PROSIDING

PERTEMUAN KOORDINASI VIRTUAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT BERSAMA MITRA PEMBANGUNAN

14 – 15 JULI 2020

DEKLARASI MANOKWARI

“MEWARISKAN MATA AIR BAGI ANAK CUCU KITA BUKAN SEBALIKNYA MEWARISI AIR MATA BAGI MEREKA”

JULI 2020

UCAPAN TERIMA KASIH
CEO YAYASAN ECONUSA

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenaannya, kami dapat menyusun prosiding Pertemuan Koordinasi Virtual : "Capaian Implementasi Deklarasi Manokwari antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama Mitra Pembangunan". Kegiatan ini dapat terlaksana atas inisiatif Forum Mitra Pembangunan Papua Barat, dalam hal ini penyelenggaraannya melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua Barat, dan Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda Papua) sebagai koordinator di masing-masing provinsi bekerja sama dengan Yayasan Econusa.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, tanggal 14-15 Juli 2020 diselenggarakan secara virtual dari tiga lokasi yaitu : Kantor Sekertaris Daerah Wilayah Provinsi Papua Barat di Manokwari, Kantor Gubernur Provinsi Papua di Jayapura dan Jakarta. Partisipan berasal dari OPD terkait, Mitra Pembangunan, akademisi, media, dan individu penggiat pembangunan berkelanjutan. Pertemuan Koordinasi rutin ini biasanya dilaksanakan enam bulan sekali menjadi tertunda karena COVID-19 tetapi menjadi capaian tersendiri karena dapat terselenggara di 2 Provinsi secara bersama-sama dan berlangsung sukses.

Kegiatan ini telah berhasil mendokumentasikan perkembangan capaian pelaksanaan Deklarasi Manokwari dari kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan para Mitra Pembangunan di Tanah Papua, membagi informasi bentuk-bentuk potensi dukungan dan kWerja sama kegiatan, sinkronisasi potensi dukungan dan kerjasama kegiatan Mitra Pembangunan di Tanah Papua, serta memperkuat peran dan dukungan sumber daya terhadap agenda lanjutan pelaksanaan Deklarasi Manokwari.

Dari hasil kegiatan ini, Pemerintah Daerah dapat memperoleh informasi dukungan kerja sama yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Mitra Pembangunan di Tanah Papua dalam hubungannya dengan implementasi Deklarasi Manokwari. Terima kasih kepada Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat telah memberikan kesempatan bekerjasama selama ini. Kami meyakini koordinasi dan harmonisasi program-program Pemerintah dan para Mitra Pembangunan menjadi keharusan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini serta penyusunan prosiding ini, kami ucapkan terima kasih.

Bustar Maitar
CEO Yayasan EcoNusa

UCAPAN TERIMA KASIH
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga Rapat Koordinasi Capaian Deklarasi Manokwari ini dapat terselenggara dengan baik walau harus berlangsung secara virtual pada tanggal 14-15 Juli serta menghasilkan keluaran-keluaran penting yang berguna untuk mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah adat di Tanah Papua.

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Papua Barat yang sudah memberikan arahan yang disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Drs Bapak Nataniel D Mandacan. M.Si. disamping itu kami mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Papua Barat, Bapak Nixon Saiba, rekan-rekan dari Bappeda Provinsi Papua terutama Bapak Kepala Yohanes Walilo serta forum mitra pembangunan yang dikoordinasikan oleh Yayasan EcoNusa yang mengajak Provinsi Papua berkolaborasi untuk menyelenggarakan **Pertemuan Koordinasi Virtual Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat Bersama Mitra Pembangunan**. Di samping itu tak lupa kami mengapresiasi kehadiran para OPD dan akademisi, yang turut berkontribusi sebagai peserta aktif dalam kegiatan ini.

Pertemuan ini menghasilan rekomendasi penting untuk meninjau kembali capaian dari konferensi ICBE2018 di manokwari sekaligus menemukan strategi pembangunan pasca pandemi COVID-19, maka kami berencana untuk menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif (ICBE) tahun 2021 diselenggarakan di Jayapura, Provinsi Papua yang mengambil tema **"Pembangunan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelestarian Keanekaragaman Hayati, Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pes) Dengan Partisipasi Aktif Masyarakat Adat di Tanah Papua"**.

Kerja besar kedepan tidak bisa ditawar-tawar lagi, pertemuan ini menjadi langkah besar Provinsi Papua dan Papua Barat untuk pembangunan berkelanjutan, kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri, kolaborasi dan kerjasama bersama para mitra pembangunan, melalui berbagai inovasi adalah hal yang tidak bisa penting demi kemajuan Tanah Papua.

Semoga Prosiding ini bermanfaat

Dr. Drs Muhammad Musa'ad, M.Si
Plh Sekretaris Daerah Provinsi Papua
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejateraan Rakyat
Provinsi Papua

UCAPAN TERIMA KASIH
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

Dengan mengucap Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin dan kesempatannya sehingga kita berhasil dengan lancar menyelenggarakan **"Rapat Koordinasi Virtual Capaian Implementasi Deklarasi Manokwari Antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat Serta Mitra Pembangunan Tanah Papua"** yang akan dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 14-15 juli 2020. Walapun dalam kondisi pandemic Covid-19 serta sedang dilaksanakannya PSBB dan hanya bisa berlangsung secara virtual, tetapi kita berkesempatan untuk melaksanakan rapat koordinasi gabungan kedua Provinsi, Povinsi Papua Barat dan Provinsi Papua dan berlangsung secara lancar. kesempatan berharga ini kami gunakan sebaik mungkin untuk mengindentifikasi perkembangan capaian pelaksanaan Deklarasi Manokwari di kedua Provinsi dan memperkuat peran dan dukungan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan kita bersama, tujuan pembangunan berkelanjutan di tanah papua.

Saya mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada Gubernur Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejateraan Rakyat Provinsi Papua Bapak Dr. Drs Muhammad Musa'ad, M.Si yang menyampaikan arahannya, Kepala Bappeda Papua Bapak Yohanes Walilo, serta tak lupa juga Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, kepala Bappeda Provinsi Papua Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Papua Barat, Bapak Nixson Saiba serta forum mitra pembangunan yang dikoordinasikan oleh Yayasan EcoNusa. Ucapan terima kasih kami ucapkan atas kehadiran bapak, ibu, sahabat, dan rekan-rekan semua, terutama para sahabat dari Mitra Pembangunan dan beberapa lembaga lain yang telah menyempatkan diri datang ke acara ini. Tak lupa kami juga mengapresiasi kehadiran para OPD dan akademisi, yang turut berkontribusi sebagai peserta aktif dalam kegiatan ini.

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari capaian Deklarasi Manowari Mitra Pembangunan pada tahun 2019 yang merupakan agenda bersama pemerintah dan Mitra Pembangunan. Deklarasi ini lahir dari *Internasional Conference on Biodiversity and Ecoturism and Economic Creative* (ICBE) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama berbagai lembaga lokal dan internasional.

Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan harmonisasi kegiatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dengan para Mitra Pembangunan serta menjawab tantangan dan peluang kerja sama dalam mewujudkan Provinsi Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. saya ingin mengingatkan kembali bahwa tugas utama kita semua adalah **"mewariskan mata air bagi anak cucu kita bukan sebaliknya mewarisi air mata bagi mereka"**. "dan tanah papua akan menjadi inspirasi dan contoh bagi dunia, dan itu dimulai dari kita"

Drs. Nataniel D Mandacan. M.Si
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tutupan hutan terbesar di Indonesia, yaitu seluas 24,8 juta hektar, sementara Provinsi Papua Barat memiliki sekitar 8,8 juta hektar. Kedua provinsi ini menyumbang kurang lebih 38% dari total tutupan hutan yang dimiliki Indonesia. Hutan hujan tropis di Tanah Papua ini berperan sebagai rumah bagi beragam jenis flora dan fauna dengan tingkat endemisitas yang tinggi. Keanekaragaman hayati ini mendiami ekosistem tropis terlengkap di dunia mulai dari tetumbu karang hingga pegunungan di Puncak Jayawijaya. Selain itu, juga berperan dalam menstabilisasi iklim global karena menyimpan karbon hingga 6,2 GigaTon CO2eg. Luasnya tutupan hutan dan banyaknya keanekaragaman hayati serta jasa lingkungan untuk menopang kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat secara berkesinambungan melakukan berbagai upaya dengan dukungan dari berbagai pihak untuk menjaga kelestarian hutan. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan menandatangani komitmen provinsi berkelanjutan melalui Deklarasi Manokwari dan berbagai program pemerintah di tingkat provinsi dan tingkat tapak.

Pelaksanaan komitmen Deklarasi Manokwari menuju pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua, kolaborasi bersama antara para pemangku kepentingan, khususnya antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat dengan para Mitra Pembangunan perlu dipelihara dan diperkuat. Dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Mitra Pembangunan tahun 2019 dan strategi tindak lanjut dalam penyusunan rencana program Mitra Pembangunan dengan pemerintah terkait pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua serta mengidentifikasi, merespon perkembangan baru dan membahas isu-isu penting guna mendorong akselarasi pencapaian deklarasi manokwari ditengah panduan COVID-19.

Pemerintah daerah dan Mitra Pembangunan menyepakati untuk mengusung bersama pelaksanaan Deklarasi Manokwari dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan khususnya di Papua dan Papua Barat. Dengan dukungan yang penuh komitmen yang tinggi untuk mewujudkan dan mengawal agenda tersebut. Kita tahu bahwa secara global isu pembangunan berkelanjutan adalah bagian yang tidak terpisah dari isu pembangunan yang ada di tingkat nasional maupun daerah dimana isu tersebut saling terkait satu sama lain. Dari aspek komitmen, Provinsi Papua dan Papua Barat keduanya tidak perlu diragukan karena upaya-upaya dalam mewujudkan provinsi yang berkelanjutan telah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RENSTRA RKPD, RTRW dan juga melahirkan dokumen lainnya yang mengedepankan pembangunan lingkungan seperti KLHS dan dokumen pembangunan pertumbuhan ekonomi hijau.

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH 3

RINGKASAN EKSEKUTIF 6

PENDAHULUAN 8

- Latar Belakang 8
- Maksud dan Tujuan 10
- Peserta Lokakarya 10
- Waktu Pelaksanaan 11

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT 13

- Panduan Diskusi Kelompok 13
- Diskusi Kelompok 15
- Informasi Kontak Mitra Pemabangunan yang terlibat 40

KUMPULAN PRESENTASI 41

- Sambutan dari Gubernur Papua Barat 41
- Sambutan dari Gubernur Papua 44
- Arahan Kepala Bappeda Provinsi Papua 47
- Arahan Kepala Balitbangda Papua Barat 49
- Arahan Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat 53
- Diskusi Panel 55

Tindak Lanjut 61

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat telah mengambil beberapa langkah menjaga kelestarian hutan tropis di Tanah Papua. Salah satu langkah penting adalah dengan menandatangani Deklarasi Manokwari pada tahun 2018 sebagai agenda bersama pemerintah, Mitra Pembangunan, dan para pemangku kepentingan lain dalam mencapai tujuan bersama, yakni mengantarkan keberlanjutan provinsi untuk kesejahteraan Orang Asli Papua, sumber daya alam, dan ekosistemnya. Provinsi Papua dan Papua Barat juga telah sama – sama menjadi provinsi pilot inisiasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) dengan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian PPN/ Bappenas pada tahun 2019. Perencanaan pembangunan di kedua provinsi berdasarkan prinsip PRK sejalan dengan tujuan dan target Pembangunan Berkelanjutan di kedua provinsi.

Tujuan bersama dalam mencapai Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua harus tetap diupayakan secara optimal dengan cara memperkuat kolaborasi bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat dengan para pemangku kepentingan. Pertemuan Koordinasi Rutin yang biasanya dilaksanakan enam bulan sekali menjadi tertunda karena COVID-19. EcoNusa yang senantiasa berperan sebagai akselerator dalam membangun koordinasi antara mitrapembangunan dan pemerintah di Tanah Papua berinisiatif untuk mengadakan Pertemuan Koordinasi Virtual Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama Mitra Pembangunan.

Deklarasi Manokwari

1. Berkomitmen terhadap pencapaian tujuan dari pembangunan berkelanjutan, termasuk mengevaluasi tata ruang untuk mencapai minimal 70% areal lindung.
2. Melindungi hak-hak dan memperkuat peran dari masyarakat adat.
3. Melaksanakan penegakan hukum, menerapkan moratorium izin-izin baru perkebunan berskala besar, meninjau ulang perizinan konsesi-konsesi yang ada.
4. Bekerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan mekanisme pendanaan untuk peningkatan investasi yang menginsentifkan konservasi dan pembangunan berkelanjutan.
5. Peningkatan sistem manajemen informasi dan transparansi.
6. Mendirikan museum dan kebun raya untuk meningktakan pengetahuan tentang keanekaragaman hayati dan budaya.
7. Meningkatkan kapasitas terkait dengan perencanaan regional, pengelolaan taman nasional, pengembangan kapasitas terkait dengan perencanaan daerah, manajemen area yang dilindungi, penguatan masyarakat dalam program-program konservasi, dan mengembangkan kurikulum muatan lokal.
8. Mendukung masyarakat adat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang sesuai dan meningkatkan akses ke pasar.
9. Mendorong adanya institusi independen untuk menyelesaikan konflik-konflik lingkungan, dan meningkatkan penegakan hukum terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada.
10. Meninjau kembali status dan menetapkan area konservasi dan koridor-koridor, termasuk area bakau, sagu rawa, gambut dan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi.
11. Mengevaluasi dampak lingkungan dari infrastuktur dan menjamin pembangunan infrastruktur baru sudah sesuai dengan ketentuan kaedah lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
12. Mempercepat peraturan pemerintah untuk pengembangan ketahanan pangan.
13. Membangun kerjasama (global, nasional, lokal) dan mekanisme koordinasi untuk mempromosikan model-model investasi untuk pertumbuhan berkelanjutan.
14. Melanjutkan kerjasama antara organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat adat, dan meningkatkan kapasitas perempuan dan tokoh masyarakat dan organisasi.

Tujuan Rapat Koordinasi

Pertemuan koordinasi ini bertujuan untuk:

1. Koordinasi regular serta mengidentifikasi dan merespon perkembangan baru dalam pencapaian Deklarasi Manokwari di Tanah Papua;
2. Menindaklanjuti hasil pertemuan koordinasi Mitra Pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2019;
3. Membahas isu - isu penting, termasuk tantangan dan peluang terkait pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua, khususnya terkait pandemic COVID-19;
4. Sinkronisasi rencana program Mitra Pembangunan dengan pemerintah terkait Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua.

Hasil dari Rapat Koordinasi

Dari pertemuan koordinasi ini, diharapkan hasil sebagai berikut:

1. Disepakatinya strategi tindak lanjut pencapaian butir – butir Deklarasi Manokwari di Tanah Papua;
2. Tersampaikannya informasi mengenai perkembangan pencapaian butir–butir Deklarasi Manokwari di Tanah Papua;
3. Teridentifikasinya tantangan dan peluang terkait pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua;
4. Tersinkronisasinya rencana program Mitra Pembangunan dengan pemerintah terkait Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua.

Peserta Pertemuan dan Partisipasinya

Peserta pertemuan Rapat Koordinasi selama 2 (dua) yang mengisi daftar hadir secara virtual 101 orang pada hari pertama, sedangkan pada hari kedua pelaksanakan yang mengisi daftar hadir sebanyak 67 peserta yang berasal OPD terkait, Mitra Pembangunan, akademisi, dan media.

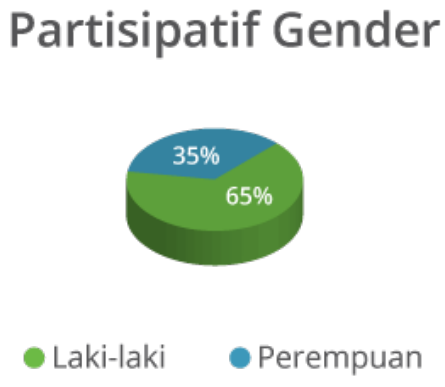

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan secara online dengan menggunakan program Zoom yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa – Rabu, 14 – 15 Juli 2020
Pukul **:** Pukul 10-00 WIT – 17.00 WIT (WAKTU PAPUA)

Hari Pertama

- **Sesi Pembukaan** oleh: (i) Bapak Nataniel D. Mandacan, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat; dan (ii) Bapak Muhammad Musaad, Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus menyampaikan Kesiapan Provinsi Papua menjadi Pelaksana ICBE 2021.

- **Sesi Perkembangan Pencapaian Deklarasi Manokwari (1 jam)**, membahas mengenai perkembangan baru dalam pencapaian butir – butir Deklarasi Manokwari dan membahas tantangan dan peluang terkait pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua, termasuk capaian target 70% kawasan yang dilindungi, skema pendanaan dan investasi hijau, dan update mengenai perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Secara umum akan dibagi menjadi 2 paparan:

  - Update perkembangan pembangunan terkait Deklarasi Manokwari Provinsi Papua: Kepala Bappeda Provinsi Papua Bapak Yohanes Walilo
  - Update perkembangan pembangunan terkait Deklarasi Manokwari Provinsi Papua Barat: Kepala Balitbangda Provinsi Papua Barat Bapak **Prof Charlie D Heatubun** dan Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Bapak Nixon Saiba

- **Sesi Update dari Mitra Pembangunan** dimana perwakilan Mitra Pembangunan yang berkeinginan untuk memberikan update masing – masing organisasi terkait program kerjanya dan strategi implementasi program dalam waktu pandemik COVID-19.

- **Sesi Diskusi Kelompok (2 jam),** difokuskan untuk membahas tindak lanjut pertemuan koordinasi Mitra Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2019 dan membahas rencana sinkronisasi program Mitra Pembangunan dengan pemerintah terkait Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua. Fasilitator membuka acara diikuti dengan pembagian kelompok diskusi berdasarkan

beberapa cluster. Diskusi kelompok akan dihadiri oleh perwakilan Mitra Pembangunan dan juga perwakilan OPD dari masing – masing provinsi, termasuk Balitbangda, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perkebunan/Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Hukum.

Hari Kedua

- **Sesi Penyampaian Hasil Diskusi Kelompok** yang akan disampaikan oleh masing – masing perwakilan kelompok diskusi atas hasil diskusi bersama.

- **Sesi Penutupan dan Kesimpulan**

WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
HARI PERTAMA		
10.00 – 10.15 WIT	Pembukaan	Sekda Provinsi Papua Barat
10.30 – 10.30 WIT	Keynote Speech	Asisten II Provinsi Papua
10.30 – 11.15 WIT	Update Provinsi Papua	Kepala Bappeda
11.15 – 12.00 WIT	Update Provinsi Papua Barat	Kepala Balitbangda
		Kepala Bappeda
12.00 – 13.00 WIT	Break Makan Siang	
13.00 – 14.30 WIT	Update Mitra Pembangunan	
14.30 – 14.45 WIT	Pembagian Kelompok Diskusi	Fasilitator
14.45 – 16.45 WIT	Diskusi Kelompok • Kelompok I	Moderator: Risdianto
	• Kelompok II	Moderator: Robert Mandosir
	• Kelompok III	Moderator: M. Farid
	• Kelompok IV	Moderator: Lukas Rumetna
16.45 – 17.00 WIT	Penutup Hari Pertama Rapat	Fasilitator
HARI PERTAMA		
10.00 – 12.00 WIT	Penyampaian Hasil Diskusi Hari Pertama	Fasilitator dan perwakilan masing – masing kelompok
12.00 – 12.30 WIT	Kesimpulan dan Penutupan	Fasilitator

PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT

Panduan Diskusi Kelompok

Pembahasan Rencana tindak lanjut dilakukan melalui pembentukan kelompok diskusi guna menghasilkan komitmen berupa rencana tindak lanjut dengan cara membagi peserta kedalam *cluster-cluster* sesuai isu yang dilakukan adapun *cluster* tersebut adalah :

PEMBAGIAN CLUSTER UNTUK DISKUSI KELOMPOK

1. **Cluster 1** (Berkaitan dengan butir 1, 3, 7, 9, 10, dan 11)

   - Menyangkut RTRW dan komitmen untuk mencapai 70% area lindung. Diskusi Kelompok.
   - Meninjau kembali status dan menetapkan area konservasi dan koridor-koridor, termasuk area bakau, sagu, rawa, gambut dan area dengan nilai tinggi hayati,
   - Mengevaluasi dampak lingkungan dari infrakstruktur dan menjamin pengembangan infrakstruktur sesuai dengan ketentuan kaidah lingkungan.
   - Mendorong adanya institusi independen untuk menyelesaikan konflik-konflik lingkungan dan meningkatkan penegakkan hukum terhhadap peraturan yang sudah ada.
   - Melaksanakan penegakan hukum, menegakkan moratorium izin-izin baru perkebunan secara berskala besar, meninjau kembali konsensi-konsensi yang ada.

2. **Cluster 2** (Berkaitan dengan butir 2, 5, 6, 7, 8, 12 dan 14)

   - Yang pertama membahas tentang melindungi dan memperkuat peran dari masyarakat adat.
   - Mendukung masyarakat adat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang sesuai dan meningkatkan ke pasar.
   - Peningkatan sistem manajemen informasi dan transparasi.
   - Mempercepat peraturan pemerintah untuk pengembangan ketahanan pangan.
   - Mendirikan museum dan kebun raya untuk meningkatkan pengetahuan tentang keanekaragaman hayati dan budaya.

3. **Cluster 3** (Berkaitan dengan isu bentang laut)

   - Membangun kerja sama secara global, nasional dan lokal dan mekanisme koordinasi untuk mempromosikan model-model investasi untuk pertumbuhan berkelanjutan.
   - Bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan mekanisme pendanaan untuk peningkatan investasi yang menginsentifkan konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

4. **Cluster 4** (Berkaitan dengan butir 4, 7, dan 13)

   - Membangun kerja sama secara global, nasional dan lokal dan mekanisme koordinasi untuk berkaitan dengan praktek berkelanjutan terkait laut dan pesisir.
   - Komitmen untuk melindungi hak dan memperkuat peran Masyarakat Hukum Adat berkaitan dengan keberadaan, tata kelola, dan wilayah kelola perairan adat.
   - Komitmen untuk penetapan kawasan dan/atau koridor konservasi perairan.

Agar diskusi tersebut terarah maka setiap *cluster* diskusi membahas pertanyaan berikut :

1. Siapa mitra pemerintah/OPD yang harus dilibatkan?
2. K/L pusat yang perlu dilibatkan di pemerintah pusat?
3. Siapa mitra pembangunan yang harus terlibat?
4. Kebijakan pemerintah yang harus terintegrasi?
5. Apa yang bisa dicapai dalam 6 bulan?
6. Bagaimana memastikan keterlibatan masyarakat secara luas?
7. Apa tantangan dan dukungan apa yang dibutuhkan untuk pencapain target?

Hasil Diskusi Kelompok

CLUSTER 1

Topik besar bahasan	• RTRW dan Komitmen 70% Area Lindung • Status Area Konservasi dan Koridor Keanekaragaman Hayati Tinggi • Infrastruktur Sesuai Kaidah Lingkungan • Institusi Independen Penyelesaian Konflik dan Penegakan Hukum • Penegakan Hukum, Moratorium Izin dan Peninjauan Konsesi yang ada • Lintas Cluster	
OPD yang terlibat	Dinas PUPR, Dinas TPHBun, BPKH, Dinas LHP, ATR/BPN, Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas PTSP	
Mitra Pembangunan dan CSO yang terlibat	Update Provinsi Papua PSP, TAF, CIFOR, WRI, FFI, GIZ, WWF, EcoNusa, Inobu, GGGI, Samdhana, PERDU, Walhi Eknas, Jerat Papua, Panah Papua, ICEL, Mnukwar, Greenpeace	
RTRW dan Komitmen 70% Area Lindung (rencana 6 bulan ke depan)	**Provinsi Papua**	**Provinsi Papua Barat**
	GGGI: pelibatan KPH dalam pencapaian komitmen 70%	FFI: – Koordinasi dan penataan blok di Raja Ampat dengan BKSDA – Monitoring cagar alam
	GIZ: percepatan tata kelola hutan di wilayah KPH	WRI: kolaborasi studi naskah akademik untuk menjelaskan konsep 70% kawasan lindung (dari segi biofisik, sosial budaya, hukum, dan ekonomi)
	CIFOR: – studi analisis hulu hilir di 3 Kabupaten (Jayawijaya, Mappi, dan Merauke – Penyusunan dan integrase KLHS ke Rencana Tata Ruang KSP Merauke, Mappi, dan Boven Digoel	CIFOR: studi analisis hulu hilir di Kabupaten Manokwari Selatan
	Penyusunan KLHS dan RPPLH, termasuk analisis data dukung lingkungan dalam RTRW	Inobu: penyusunan strategi REDD+
	TAF: follow-up masukan terhadap perubahan dokumen RTRW	GIZ: percepatan tata kelola hutan di wilayah KPH
	Dukungan tenaga ahli ke dalam SK Peninjauan Kembali RTRW: PSP, TAF, CIFOR, EcoNusa, WRI, dan WWF.	Finalisasi dan konsolidasi usulan sebelum pelaksanaan rapat TKPRD, khususnya untuk peta wilayah adat (WRI, WWF, PSP, Samdhana, TAF, EcoNusa, CIFOR, PERDU)

	Dukungan tenaga ahli ke dalam SK Peninjauan Kembali RTRW: PSP, TAF, CIFOR, EcoNusa, WRI, dan WWF.	Finalisasi dan konsolidasi usulan sebelum pelaksanaan rapat TKPRD, khususnya untuk peta wilayah adat (WRI, WWF, PSP, Samdhana, TAF, EcoNusa, CIFOR, PERDU)
	Penyusunan Bab Masyarakat Adat sebagai Bab tambahan dalam revisi Perda RTRWP Papua (Jerat Papua - TAF)	Akomodasi wilayah adat ke dalam dokumen RTRWP: TAF dan WWF
	Konsolidasi dan standarisisasi peta – peta wilayah adat untuk diintegrasikan dalam revisi RTRWP Papua (Jerat Papua – TAF - PSP)	WWF: kesepakatan Peta Kawasan Strategis dan perlindungan budaya
		Pengintegrasian wilayah adat ke dalam dokumen Revisi RTRW Kabupaten Teluk Bintuni (Panah Papua – TAF - PSP)
		EcoNusa: pengintegrasian hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit ke dalam dokumen Revisi RTRWP
Status Area Konservasi dan Koridor Keanekaragaman Hayati Tinggi	**Provinsi Papua**	**Provinsi Papua Barat**
	CIFOR: melalui Papua Atlas akan melakukan monitoring wilayah cagar alam dan tutupan hutan Greenpeace akan Kolaborasi dengan CIFOR melakukan monitoring wilayah cagar alam dan tutupan hutan.	WWF: memastikan KSP Mahkota dan HCV masuk ke dalam dokumen RTRW
	WWF: menjadikan Rencana Konservasi Bentang Alam sebagai baseline KLHS dan RTRW untuk kajian HCV Kabupaten Merauka, Mappi, dan Boven Digoel	Greenpeace dan FFI : Kolaborasi monitoring Kawasan Cagar Alam/Suaka Margasatwa Tambrauw dan sekitarnya
	FFI: menjadikan hasil studi HCV Landscape Kabupaten Jayapura sebagai bahan RTRW	
Infrastruktur sesuai Kaidah Lingkungan	**Provinsi Papua**	**Provinsi Papua Barat**
	Kajian Trans Papua (Merauke – Sorong): – CIFOR akan menganalisis dampak terhadap kawasan lindung, hutan alam, dan wilayah masyarakat adat	Pelaksanaan analisis Kawasan Strategi Daerah untuk energi di Kabupaten Teluk Bintuni: EcoNusa dan TAF

	– WALHI – TAF akan melaksanakan desk studi termasuk memfasilitasi interaksi dengan sejumlah kementerian untuk memperoleh data – Greenpeace : Kolaborasi Studi dengan TAF	
	Komunikasi dengan Bappenas melalui Desk Papua terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur akan dilakukan oleh UKCCU, CIFOR, dan TAF	Komunikasi dengan Bappenas melalui Desk Papua terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur akan dilakukan oleh UKCCU, CIFOR, dan TAF
		Pelaksanaan analisis penetapan Kawasan Ekonomi Strategis Sorong
Institusi Independen Penyelesaian Konflik dan Penegakan Hukum Hukum	**Provinsi Papua**	**Provinsi Papua Barat**
	Kesepakatan tools untuk melakukan evaluasi perizinan: TAF, WRI, EcoNusa	Kesepakatan tools untuk melakukan evaluasi perizinan: TAF, WRI, EcoNusa
	Perlu diadakan kontak dengan Conflict Resolution Unit (CRU)	
Penegakan Hukum, Moratorium Izin, Peninjauan Konsesi yang Ada	**Provinsi Papua**	**Provinsi Papua Barat**
	Evaluasi perizinan sektor pertambangan: TAF	Evaluasi perizinan sektor pertambangan: TAF
	Evaluasi perizinan sektor kehutanan: TAF, WWF, EcoNusa	Evaluasi perizinan sektor perkebunan kelapa sawit: EcoNusa
	Evaluasi perizinan sektor perkebunan kelapa sawit: WRI, EcoNusa	EcoNusa: – memfasilitasi pelatihan GIS, PPNS, hukum, dan penambahan PUP terkait perizinan perkebunan kelapa sawit – tindak lanjut penanganan tanah terlantar dengan Tim Terpadu
	Evaluasi perizinan sektor pertambangan dan Kehutanan (ICEL - TAF)	Evaluasi perizinan sektor pertambangan dan Kehutanan (ICEL - TAF)
	Greenpeace: Evaluasi Izin sektor Perkebunan dan Kehutanan dan Membuka kasus korupsi perizinan	Greenpeace: Evaluasi Izin sektor Perkebunan dan Kehutanan dan Membuka kasus korupsi perizinan
	TAF: melaksanakan pelatihan investigasi bersama ICW	
Lintas Cluster	– Perlu diadakan diskusi yang membahas mengenai Rancangan Revisi UU Otsus yang mengaitkan PSDA dan masyarakat adat: TAF, WRI, Foker LSM Papua	
	– Indonesia Intact Rainforest Partnership (IIRP) hadir sebagai suatu kemitraan yang berfokus kepada penyelamatan intact forest di provinsi – provinsi yang berhutan lebat, termasuk Papua dan Papua Barat.	

PEMAPARAN HASIL DISKUSI

15 JULI 2020

CLUSTER 1

DM KOMITMEN : 1, 3, 7, 9, 10, 11

RTRW & 70% KOMITMEN CAPAIAN AREA LINDUNG

TINJAU KEMBALI STATUS

TETAPKAN AREA KONSERVASI

AREA NILAI TINGGI HAYATI

SAGU · BAKAU · RAWA · GAMBUT

EVALUASI

DAMPAK LINGKUNGAN

INFRASTRUKTUR

PENGEM-BANGAN

JAMINAN

KETENTUAN KAIDAH LINGKUNGAN

KONFLIK LING-KUNGAN

ATURAN

INSTITUSI INDEPENDEN

TEGAKKAN

LAKSANAKAN

PENEGAK-AN HUKUM

MORA-TORIUM

KONSESI

TINJAU KEMBALI

IZIN BARU

PERKEBUNAN SKALA BESAR

6 UPDATE DAN RENCANA BULAN KEDEPAN...

RTRW DAN KOMITMEN 70% AREA LINDUNG

PROVINSI PAPUA

HASIL PENINJAUAN KEMBALI

RTRW → SUDAH DISAM-PAIKAN → BAPPEDA → REVISI SEBAGIAN DOKUMEN

MASUKAN PERUBAHAN DOKUMEN

SUDAH DISAMPAIKAN

TAF

SK PK RTRW

DRAFT SUDAH ADA

BAPPEDA

SEBAGAI TINDAK LANJUT PERTE-MUAN

USULAN TENAGA AHLI

WWF · PSP · TAF · WRI · CIFOR · ECONUSA

RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROV.
> Merauke
> Mappi
> Boven Digul

PROSES PENYUSUNAN & INTEGRASI KE KLHS

CIFOR

KOMITMEN 70%

PELIBATAN

KPH

GGGI

PERCEPATAN TATA KELOLA HUTAN

WILAYAH KPH

GIZ

PENYUSUNAN KLHS - RPPLH

Analisis Daya Dukung Lingkungan dalam

RTRW

STUDI ANALISIS HULU HILIR DI 4 KABUPATEN:

CIFOR

MANSEL · JAYAWIJAYA · MAPPI · MERAUKE

PROVINSI PAPUA BARAT

AKOMODASI WILAYAH ADAT

TAF · WWF

RTRW

KLHS

PENJAMINAN KUALITAS

INTEGRASI

AKAN DIFINALKAN

DOKUMEN REVISI · RT · RW

KAB. BINTUNI

KESEPAKATAN PETA KAWASAN STRATEGIS DAN PERLINDUNGAN BUDAYA

REVISI RTRW

WILAYAH ADAT

INTEGRASI

TAF / PANAH PAPUA

INTEGRASI

HASIL EVALUASI PERIZINAN

RTRW

ECONUSA

BLOK RAJA AMPAT

KOORDINASI

BKSDA

FFI

PENETAPAN

MONITORING CAGAR ALAM

KOLABORASI STUDI

WRI

NASKAH AKA-DEMIK

MENJELASKAN

70% KONSEP

BIOFISIK · SOSIAL BUDAYA · EKONOMI · LEGAL

KAWASAN LINDUNG

FINALISASI & KONSOLIDASI

USULAN · USULAN

SEBELUM TKPRD

WRI · WWF · PSP · TAF · SAMDHANA · CIFOR · ECONUSA

TERUTAMA

WILAYAH ADAT

STRATEGI REDD+ (INOBU)

PERCEPATAN TATA KELOLA HUTAN

WILAYAH KPH

GIZ

STATUS AREA KONSERVASI DAN KORIDOR KEANEKARAGA-MAN HAYATI

PROVINSI PAPUA

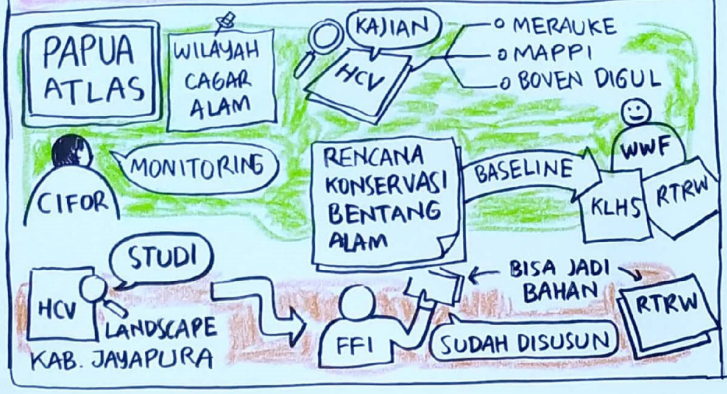

PROVINSI PAPUA BARAT

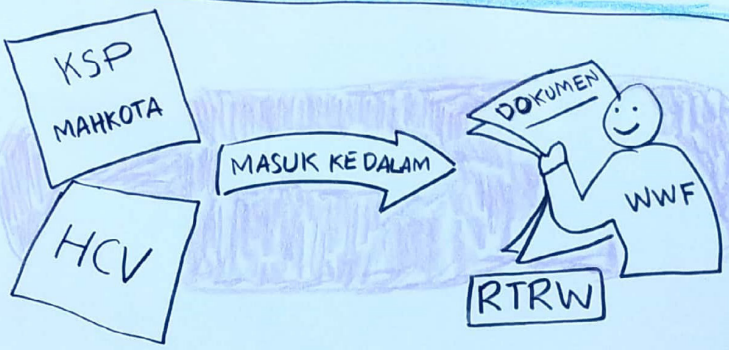

INFRASTRUKTUR SESUAI KAIDAH LINGKUNGAN

PROVINSI PAPUA

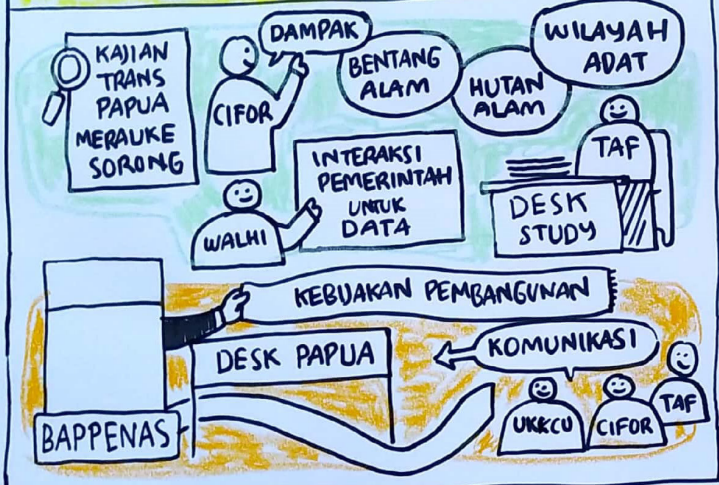

PROVINSI PAPUA BARAT

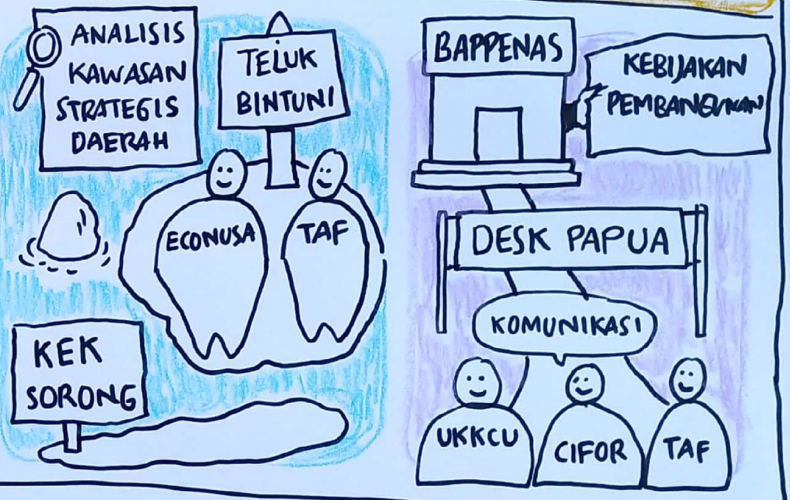

INSTITUSI INDEPENDEN PENYELESAIAN KONFLIK & PENEGAKAN HUKUM

PROVINSI PAPUA

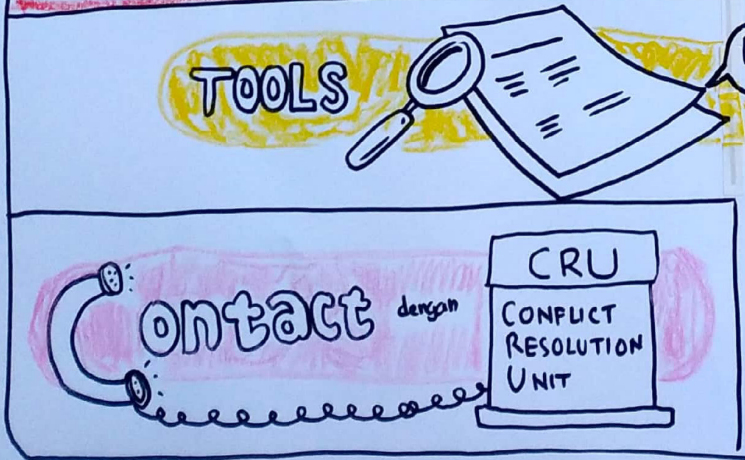

PROVINSI PAPUA BARAT

PENEGAKAN HUKUM, MORATORIUM IZIN DAN PENINJAUAN KONSESI YANG ADA

PROVINSI PAPUA

PELATIHAN

TAF/ICW

investigasi

EVALUASI PERIZINAN
- ADMINISTRASI
- PELANGGARAN HUKUM

TAF
- PERTAMBANGAN
- PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
- KEHUTANAN (HANYA PRON. PAPUA)
  - TAF
  - ELO NUSA
  - WWF
- WRI
- ECONUSA

KASUS KORUPSI PERIZINAN
- GP

PROVINSI PAPUA BARAT

ECONUSA

PELATIHAN
- GIS
- PPNS
- LEGAL
- PETUGAS PUP

TINDAK LANJUT TEMUAN
- TANAH TERLANTAR

LINTAS CLUSTER

KAJIAN
- OTSUS
- CSO
- TAF
- WRI

PSDA
MASYARAKAT ADAT

INISIATIF INDONESIA INTACT RAINFOREST PARTNERSHIP

FOKUS PADA PENYELAMATAN
- INTACT FOREST

CLUSTER 2

DW KOMITMEN: 2, 5, 6, 7, 8, 12 DAN 14

UPAYA MELINDUNGI DAN MEMPERKUAT PERAN DARI MASYARAKAT

PAPUA

IDENTIFIKASI
- MASYARAKAT ADAT

PENDAFTARAN TANAH ADAT
- KEMTUK
- KIESI
- NAMBLONG

KAB. JAYAPURA

PAPUA BARAT

MASYARAKAT ADAT

FASILITASI
- PANAH PAPUA
- SAMDHANA

PENDAFTARAN TANAH ADAT
- MARGA OGONEY KAB. TELUK BINTUNI
- MARGA BAHO KAB. MAYBRAT

PERTEMUAN

PEMBAHASAN MEKANISME PENDAFTARAN TANAH ADAT

KHUSUS DI PAPUA BARAT

PSP
FASILITATOR

- MITRA
- DIREKTUR MASYARAKAT KOMUNAL
- MITRA KERJA

PENYUSUNAN
- PANDUAN
- PEDOMAN

CLUSTER 2

Topik Besar	» Upaya melindungi dan memperkuat peran dari masyarakat adat » Mendukung masyarakat adat untuk mengembangkan kegitan ekonomi yang sesuai dan meningkatkan ke pasar » Peningkatan system manajemen informasi dan transparansi » Mempercepat peraturan pemerintah untuk pengembangan ketahanan pangan » Mendirikan museum dan kebut raya untuk meningkatkan pengetahuan tentang keanekaragaman hayati dan budaya	
OPD yang terlibat		
Mitra Pembangunan dan CSO yang terlibat		
	Provinsi Papua	**Provinsi Papua Barat**
Upaya melindungi dan memperkuat peran dari masyarakat adat OPD yang terlibat: – Dinas LH dan Pertanahan Papua Barat. – Biro Hukum, Biro Otsus. – BPN (Kanwil dan Kantor)	**Samdhana:** – Identifikasi Masyarkat Adat yang akan melakukan Pendaftaran Tanah Adat misalnya Kemtuk, Klesi dan Namblong di Kab. Jayapura, – Penyusunan Pedoman/ Panduan tentang Mekanisme Pendaftaran Tanah Adat. **PSP:** Memfasilitasi Pertemuan Mitra dengan Direktur Masyarakat Komunal dan Mitra Kerja terkait dengan Pembahasan Mekanisme Pendaftaran Tanah Adat	**Samdhana dan Panah Papua:** Menfasilitasi Masyarakat untuk melakukan Pendaftaran Tanah Adat Marga Ogoney Kab.Teluk Bintuni dan Marga Baho Kab. Maybrat **Samdhana:** Penyusunan Pedoman/Panduan tentang Mekanisme Pendaftaran Tanah Adat. **Greenpeace:** Pendaftaran wilayah adat Knasaimos di Kabupaten Sorong selatan **PSP:** Memfasilitasi Pertemuan Mitra dengan Direktur Masyarakat Komunal dan Mitra Kerja terkait dengan Pembahasan Mekanisme Pendaftaran Tanah Adat **Mnukwar:** Mendampingi proses pemetaan wilayah adat dan inisiatif pembentukan hutan adat dan perhutanan social lainnya. Salah satunya di Kampung Siwi Kabupaten Mansel.
Mendukung masyarakat adat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang sesuai dan meningkatkan ke pasar	**Samdhana:** Inventarisasi dan Pembuatan Database kelompok usaha/ ekonomi Masyarakat Adat	**Bentara Papua:** – Inventarisasi dan Pembuatan Database kelompok usaha/ ekonomi Masyarakat Adat

OPD yang terlibat: – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ DPMPTSP – Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan, Dinas Pertanian/ Perkebunan), informasi APBD (Bappeda)	**EcoNusa:** – Pembentukan Hub Produksi dan MarketPlace Masyarakat Adat. (Kemasan dan strategi Pemasaran) – Pembentukan Bisnis Inkubator sebagai Pusat pengkaderan Pengusaha Muda Papua (Papuan Youth entrepreneur). EcoNusa akan menyediakan Tenaga pendamping Business Incubator. **WWF:** Pengembangan Ekowisata Aryobu dan Asai di Yapen, Rhepang muaib di Kabupaten Jayapura **CIFOR:** akan melakukan kajian mengenai bagaimana penjualan online dapat membantu masyarakat adat mengembangkan pertanian, dan penjualan produk pertanian sayur dan buah.	– Menyediakan pasar (Bekal Mart) untuk produk masyarakat berlokasi di Manokwari saat ini menampung produk masyarakat dari seputaran Sorong, Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak. **WRI dan Mnukwar:** Melakukan survey, kajian dan pendampingan terhadap petani Kakao di mansel. **Greenpeace:** Mengidentifikasi entrepreneur local bidang pangan di Papua Barat dan best practices pengelolaan hutan. **EcoNusa:** – Pembentukan Hub Produksi dan MarketPlace Masyarakat Adat. (Kemasan dan strategi Pemasaran). EcoNusa sedang mempersiapkan hub di Kaimana dan Sorong untuk mendukung jalur pemasaran/rantai pasok – Pembentukan Bisnis Inkubator sebagai Pusat pengkaderan Pengusaha Muda Papua (Papuan Youth entrepreneur). EcoNusa akan menyediakan Tenaga pendamping Business Incubator. **WWF:** Pengembangan Ekowisata Resye Womom di Kabupaten Tambrauw **CIFOR:** – Melakukan kajian mengenai bagaimana penjualan online dapat membantu masyarakat adat mengembangkan pertanian, dan penjualan produk pertanian sayur dan buah.

		– Membantu BENTARA mengidentifikasi entrepreneur local bidang pangan di Papua Barat **Mnukwar:** Pemanfaatan lahan untuk pangan lokal secara optimal di Kampung Ariawimofo Distrik Neney
Peningkatan sistem manajemen informasi dan transparansi – OPD yang terlibat: – Kementrian UKM, – Dinas Kehutanan : POKJA PS: Pusat Kreatifitas Kehutanan. – Dinas Pertanian dan Hortikultura. – Dinas Perikanan dan Kelautan – Diskominfo Papua barat	**WRI, EcoNusa, TAF, WWF, Daemeter, PSP:** – Mendorong pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mempublikasikan secara on line informasi yang berdampak pada masyarakat adat, seperti informasi perizinan berbasis lahan – Mendorong mitra pembangunan untuk terlibat memperkuat pemerintah untuk keterbukaan informasi, misal informasi perizinan, informasi tata ruang, dsb **Mitra Lokal yang mendampingi masyarakat:** Mendorong organisasi masyarakat sipil dan individu untuk melakukan tahapan Permohonan Informasi, Keberatan (permohonan ditolak/tidak dipenuhi/ dipenuhi sebagian/tidak ditanggapi), Tahapan Mediasi (pada Tahap Permohonan dan Keberatan), hingga Tahapan Sengketa Informasi di Komisi Informasi provinsi (KIP) sebagaimana dijamin UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	**WRI, EcoNusa, TAF, WWF, Daemeter, PSP, Mnukwar:** – Mendorong pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mempublikasikan secara on line informasi yang berdampak pada masyarakat adat, seperti informasi perizinan berbasis lahan – Mendorong mitra pembangunan untuk terlibat memperkuat pemerintah untuk keterbukaan informasi, misal informasi perizinan, informasi tata ruang, dsb **Mnukwar** – Mendorong terbentuknya PPID di beberapa Kabupaten sesuai dengan arahan UU Keterbukaan informasi – Uji akses informasi, meminta informasi yang dianggap merupakan informasi public salah satunya adalah melalui Evaluasi Perizinan Tambang **Mitra Lokal yang mendampingi masyarakat:** – Mendorong organisasi masyarakat sipil dan individu untuk melakukan tahapan Permohonan Informasi, Keberatan (permohonan ditolak/tidak dipenuhi/ dipenuhi sebagian/ tidak ditanggapi), Tahapan Mediasi (pada Tahap Permohonan dan Keberatan), hingga Tahapan Sengketa

		Informasi di Komisi Informasi provinsi (KIP) sebagaimana dijamin UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Mempercepat peraturan pemerintah untuk pengembangan ketahanan pangan	**WRI, EcoNusa, TAF:** Kompilasi Data dan Hasil studi terkait ketahanan Pangan sebagai dasar dalam menyusun Naskah Kebijakan **EcoNusa, FFI, CLUA:** Melakukan Identifikasi terkait Regulasi yang mengatur Ketahanan Pangan lokasi **Tim RTRW:** Mengupayakan ketersedian lahan untuk ketahanan pangan yang terintegrasi dalam Revisi RTRW Prov.Papua	**CIFOR, WRI, EcoNusa, TAF:** Kompilasi Data dan Hasil studi terkait ketahanan Pangan sebagai dasar dalam menyusun Naskah Kebijakan **EcoNusa, FFI, CLUA:** Melakukan Identifikasi terkait Regulasi yang mengatur Ketahanan Pangan lokasi **Tim RTRW:** Mengupayakan ketersedian lahan untuk ketahanan pangan yang terintegrasi dalam Revisi RTRW Prov. Papua Barat
Mendirikan museum dan kebut raya untuk meningkatkan pengetahuan tentang keanekaragaman hayati dan budaya	BALITBANGDA: – Mendirikan history museum ini telah dianggarkan pada tahun ini namun masih butuh bantuan mitra dalam hal studi banding ke beberapa tempat wilayah seperti Kebun Raya Bogor, dan tempat lainnya sebagai contoh untuk di Papua	

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DAN DUKUNGAN MITRA

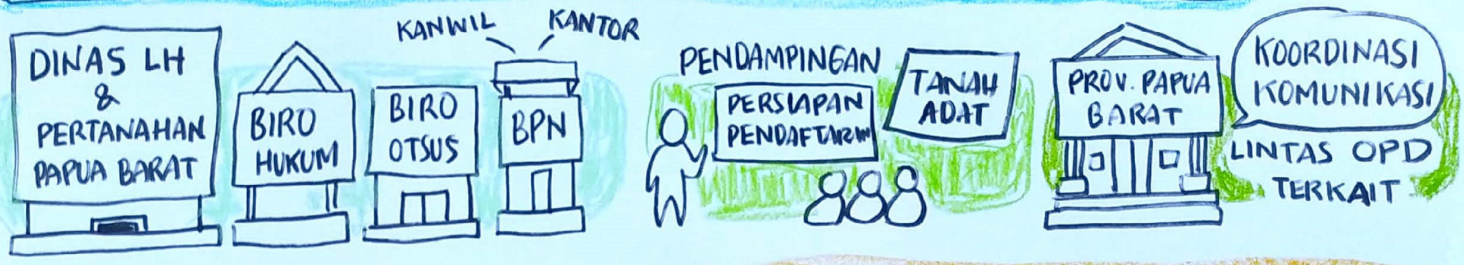

MENDUKUNG MASYARAKAT ADAT UNTUK MENGEMBANGKAN KEGIATAN EKONOMI YANG SESUAI DAN MENINGKATKAN KE PASAR

PAPUA

INVENTARISIR & BUAT DATA BASE

1. USAHA

2. USAHA EKOWISATA

PAPUA BARAT

DI PAPUA BARAT...

3. SURVEY, KAJIAN DAN PENDAMPINGAN

DI PAPUA..

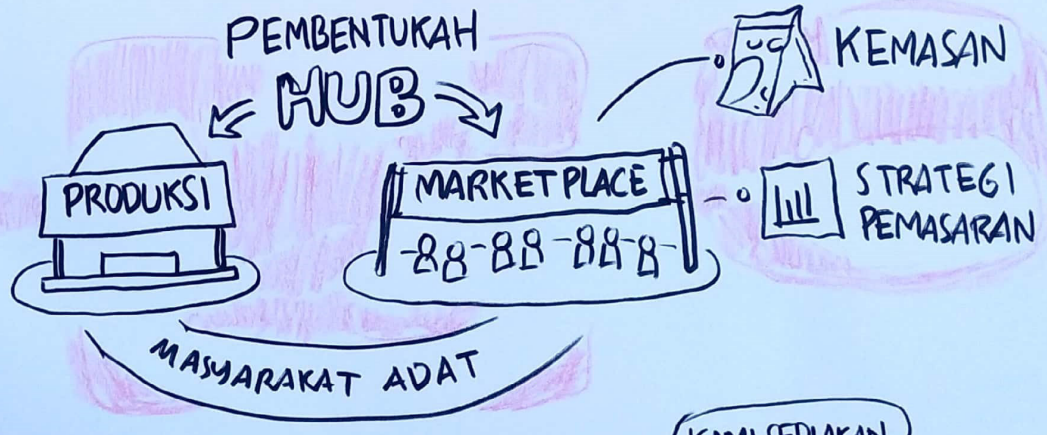

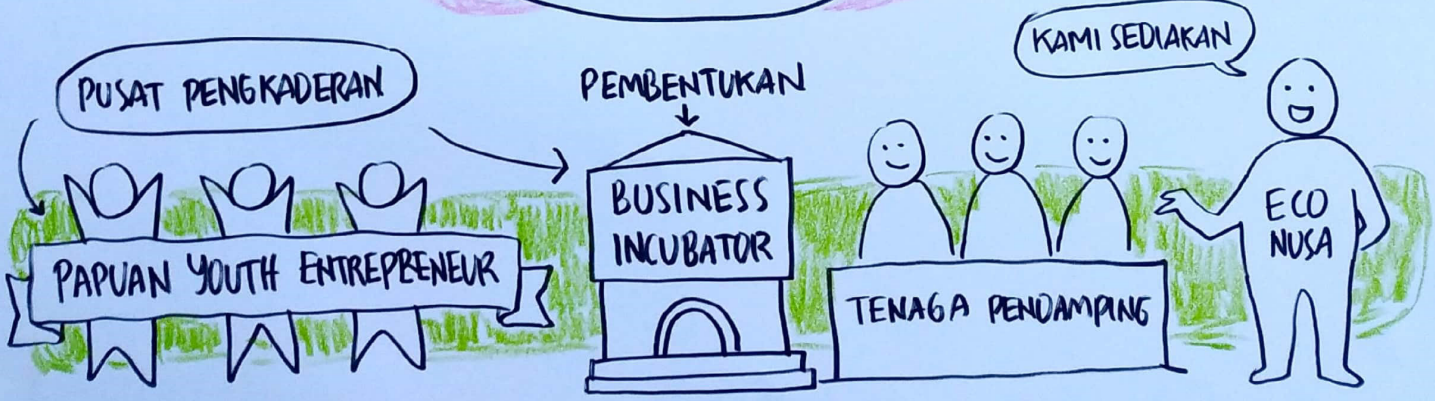

PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN INFORMASI DAN TRANSPARANSI

PAPUA

PAPUA BARAT

PIHAK YANG TERLIBAT :

DUKUNGAN MITRA

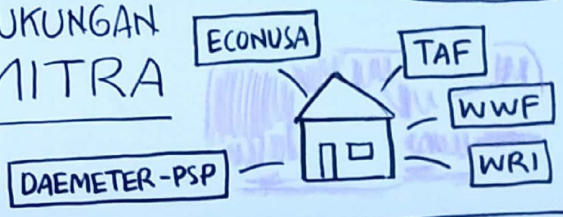

MEMPERCEPAT PERATURAN PEMERINTAH UNTUK PENGEMBANGAN KETAHANAN PANGAN

PAPUA

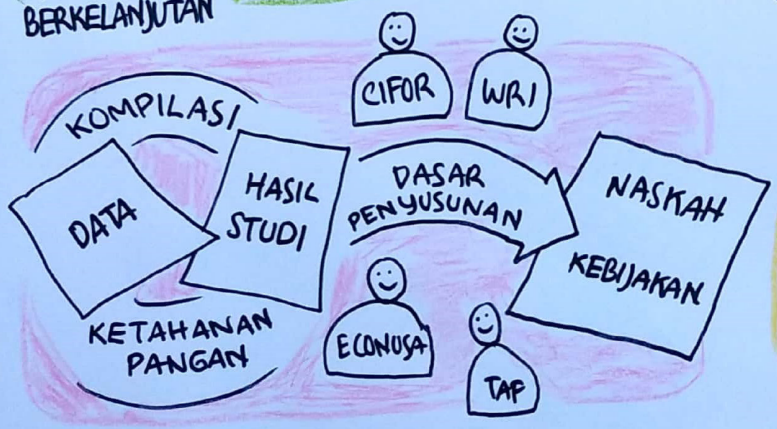

PAPUA BARAT

PIHAK YANG TERLIBAT :

- > KEMENTRIAN UKM
- > DINAS KEHUTANAN (POKJA PS)
- > DINAS PERTANIAN & HORTIKULTURA
- > DINAS PERIKANAN & KELAUTAN

CLUSTER 3

<table>
<tr><td>Topik besar bahasan</td><td colspan="2">• Membangun kerja sama secara global, nasional dan lokal dan mekanisme koordinasi untuk mempromosikan model-model investasi untuk pertumbuhan berkelanjutan.
• Bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan mekanisme pendanaan untuk peningkatan investasi yang menginsentifkan konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Key Words: Inisitif Kerjasama, Investasi Hijau, Mekanisme Pendanaan.</td></tr>
<tr><td>OPD yang terlibat</td><td colspan="2">Balitbangda</td></tr>
<tr><td>Mitra Pembangunan dan CSO yang terlibat</td><td colspan="2">(WWF), (TAF), (RFN), (YIDH), (Perdu), (WRI), (Kemitraan), (GGGI), (EcoNusa,) (Greenpeace)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">(rencana 6 bulan ke depan)</td><td>Provinsi Papua</td><td>Provinsi Papua Barat</td></tr>
<tr><td>IDH:
– Membahas tentang inisiatif pendanaan Result Based Payment
– Mendukung business model PPI compacts di Teluk Bintuni dan Nabire</td><td>IDH:
– Menyusun dokumen Investasi hijau versi lengkap/compherensif, di Tanah Papua
– Pengarusutamaan Rencana Pertumbuhan Hijau
– Mendukung penyusunan REDD+ di Tanah Papua</td></tr>
<tr><td>Kemitraan:</td><td>Kemitraan
– provinsi PaBar, mendukung sosialisasi Perdasus Provinsi Berkelanjutan</td></tr>
<tr><td colspan="2">Papua Wide (Tanah Papua)
Kemitraan
Pendampingan utk akses dana BPDLH
Nasional: fasilitasi dengan K/L terkait</td></tr>
<tr><td>GGGI:
– Mengakselerasi proposal GCF untuk akses pendanaan Perubahan Iklim</td><td>GGGI:
– Engaged Private Sector untuk menyediakan insentif</td></tr>
<tr><td>Econusa
– Mempersiapkan investasi hijau berbasis komoditas lokal di Paniai dan Yapen
– Bimtek KPH mendorong investasi hijau berbasis local</td><td>Econusa
– Opsi-Opsi mekanisme pendanaan untuk masyarakat
– Bekerjsama memperkuat Pemda dan masyarakat mengakses pendanaan RBP di BPDLH
– Menyusun Dokumen Investasi Hijau Berbasis inisitif local
– Bimtek KPH mendorong Investasi hijau berbasis masyarakat</td></tr>
</table>

	Papua Wide (Tanah Papua) **Econusa** – Opsi-Opsi mekanisme pendanaan untuk masyarakat – Bekerjsama memperkuat Pemda dan masyarakat mengakses pendanaan RBP di BPDLH – Menyusun Dokumen Investasi Hijau Berbasis inisitif local – Bimtek KPH mendorong Investasi hijau berbasis masayrakat – Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah – RPRKD – Workshop tematik sektor untuk PPRK **Nasional** – Menfasilitasi Pemda terkait kegiatan investasi hijau berbasis masayrakat dan Mekanisme pendanaan RBP-BPDL
	Papua Wide (Tanah Papua) **TAF** – Menfasilitasi implementasi Take ke kabupaten – Mengadakan Share Learning Provinsi berpengalaman dalam menerapkan MRV untuk RBP. Contoh Kaltim (Tape sudah diintegrasikan dalam RBPnya) dan Jambi. **Nasional** – Bekerjasama mempersiapkan bahan kajian RUU Otsus bersama Civil Society – TANE dibuat berkoordinasi dengan KLHK untuk DAU LHK
	Papua Wide (Tanah Papua) **WRI** – Penelitian (desktop analysis) tentang mekanisme pendanaan dan pengaruhnya terhadap pembangunan di kedua Provinsi (study kasus: carbon Bon) serta model pengelolaan sesuai konteks Papua dan distribusi sampai ke masyarakat. Termasuk pembentukan Trust fund – PPRK
	Papua Wide (Tanah Papua) **RFN** – Memperkuat pemda dan masyarakat untuk mengakses dana insentif Result Based Payment di BPDLH. Apa yang harus disiapkan agar ada pilot project carbonnya. Misalnya status legal lahan, manajemen yang solid dstnya. – Membawa Best Practices dari Jambi ke Tanah Papua dengan menggunakan skema Plan Vivo.
	Papua Wide (Tanah Papua) **CIFOR** – Pembangunan Rendah Karbon (PRK), MoU Bappenas dengan Papua dan Papua Barat (Komponen 1 Penyusunan RPRKD, Komponen 2 PEP)
	Papua Wide (Tanah Papua) **WWF** – Menfasilitasi Desk Papua mengadakan pertemuan terkait pembangunan di Tanah Papua.
	Papua Wide (Tanah Papua) **PERDU** – Mendorong Insentif dari Provinsi ke kabupaten (TIFA) bekerjsama dengan TAF

CLUSTER 3

DM KOMITMEN: 4, 7, 13

Inisiatif Kerjasama dan Investasi Hijau Mekanisme Pendanaan

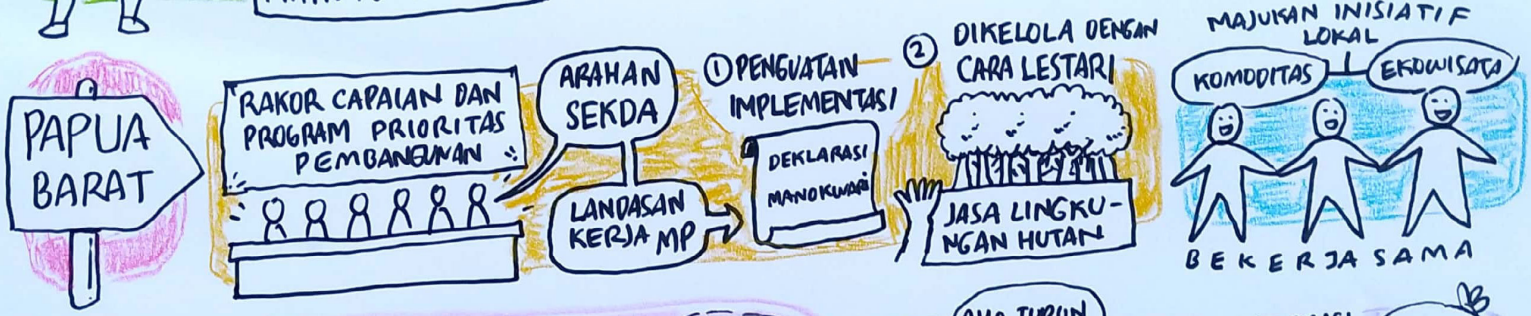

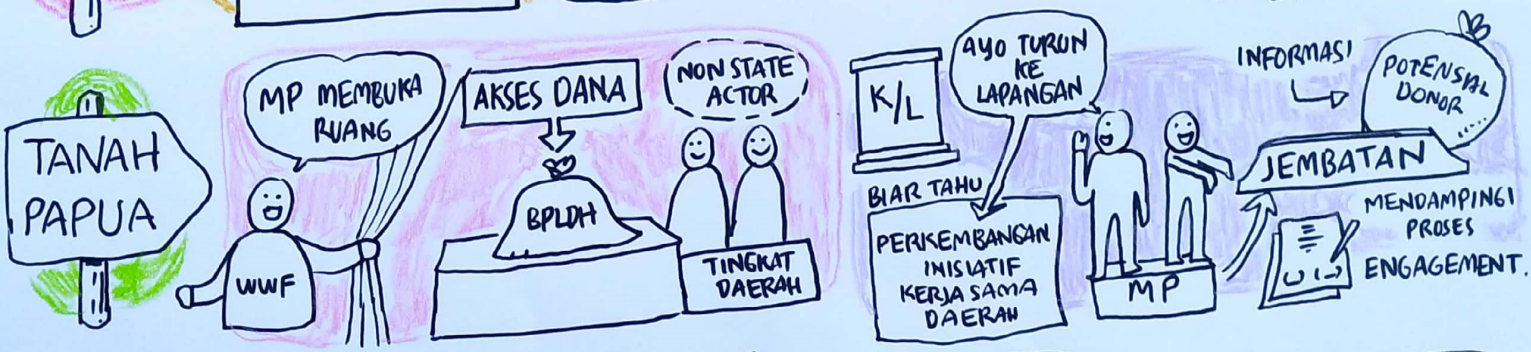

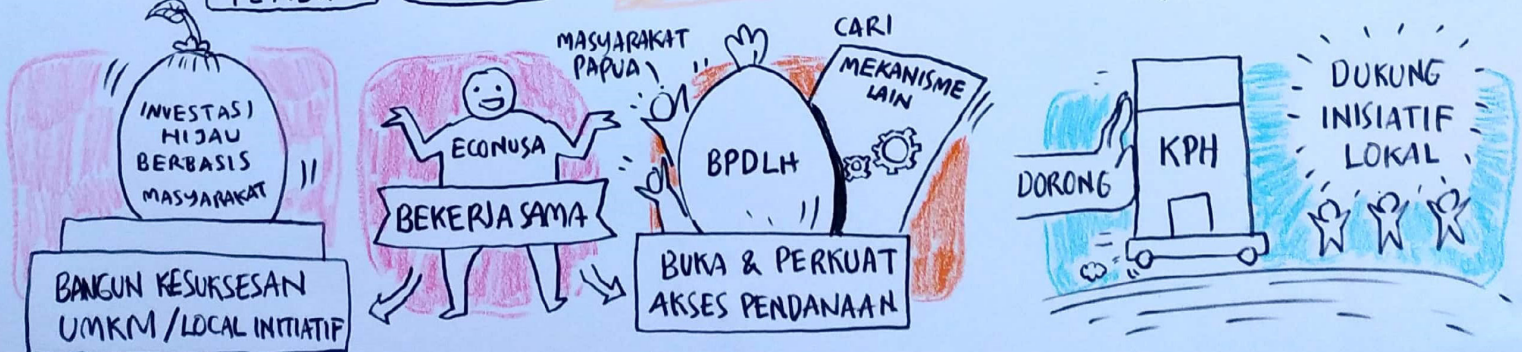

CLUSTER 3

DM KOMITMEN: 4, 7, 13

Inisiatif Kerjasama dan Investasi Hijau Mekanisme Pendanaan

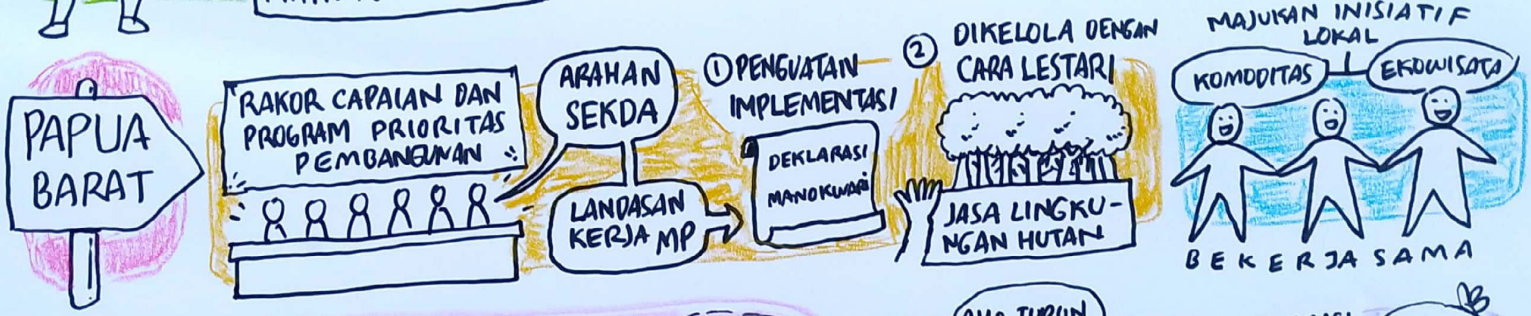

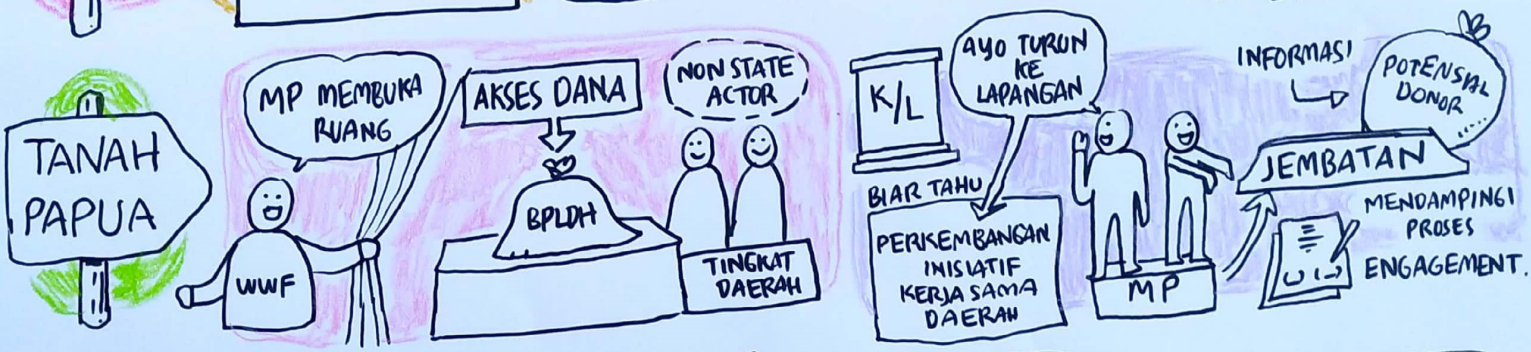

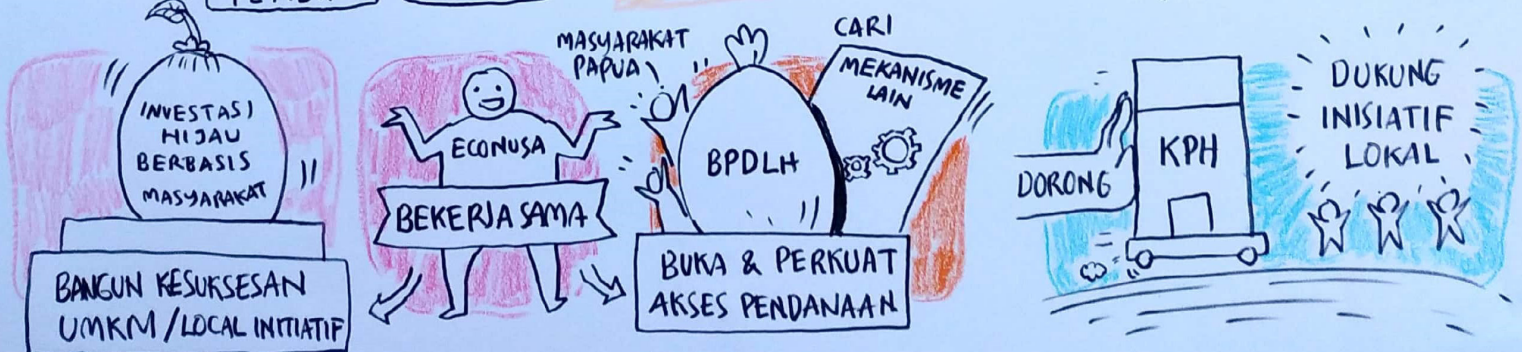

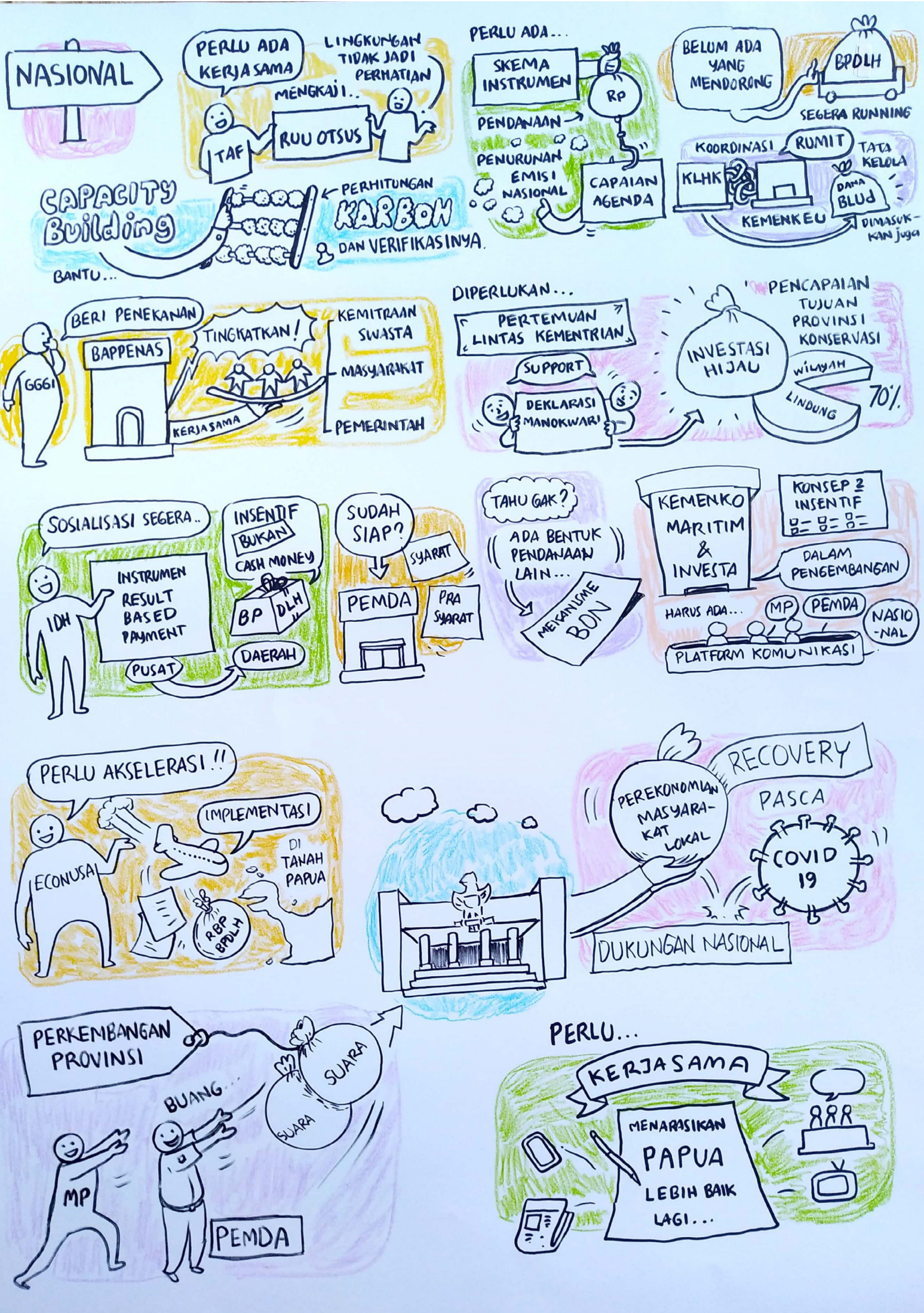
NASIONAL
PERLU ADA KERJASAMA
LINGKUNGAN TIDAK JADI PERHATIAN
MENGKAJI..
TAF
RUU OTSUS
CAPACITY Building
BANTU...
PERHITUNGAN KARBON
DAN VERIFIKASINYA
PERLU ADA...
SKEMA INSTRUMEN
RP
PENDANAAN
PENURUNAN EMISI NASIONAL
CAPAIAN AGENDA
BELUM ADA YANG MENDORONG
BPDLH
SEGERA RUNNING
KOORDINASI
RUMIT
TATA KELOLA
KLHK
DANA BLUD
KEMENKEU
DIMASUK-KAN juga
BERI PENEKANAN
GGGI
BAPPENAS
TINGKATKAN!
KERJASAMA
KEMITRAAN SWASTA
MASYARAKIT
PEMERINTAH
DIPERLUKAN...
PERTEMUAN LINTAS KEMENTRIAN
SUPPORT
DEKLARASI MANOKWARI
INVESTASI HIJAU
PENCAPAIAN TUJUAN PROVINSI KONSERVASI
WILAYAH LINDUNG
70%
SOSIALISASI SEGERA..
IDH
INSTRUMEN RESULT BASED PAYMENT
PUSAT
INSENTIF
BUKAN CASH MONEY
BP
DLH
DAERAH
SUDAH SIAP?
SYARAT
PEMDA
PRA SYARAT
TAHU GAK?
ADA BENTUK PENDANAAN LAIN...
MEKANISME BON
KEMENKO MARITIM & INVESTA
KONSEP 2 INSENTIF
DALAM PENGEMBANGAN
HARUS ADA...
MP
PEMDA
NASIO-NAL
PLATFORM KOMUNIKASI
PERLU AKSELERASI!!
ECONUSA
IMPLEMENTASI
DI TANAH PAPUA
RBP BPDLH
RECOVERY
PASCA
COVID 19
PEREKONOMIAN MASYARA-KAT LOKAL
DUKUNGAN NASIONAL
PERKEMBANGAN PROVINSI
BUANG...
SUARA
SUARA
MP
PEMDA
PERLU...
KERJASAMA
MENARASIKAN PAPUA LEBIH BAIK LAGI...

DARI PEMERINTAH SIAPA YANG TERLIBAT DAN BAGAIMANA DUKUNGAN MITRA PEMBANGUNAN ?

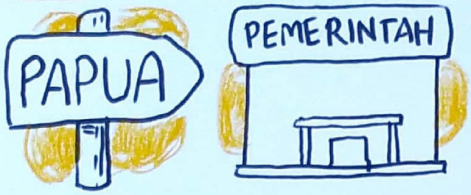

DINAS KEHUTANAN DAN KOMDA, BIRO PEREKONOMIAN, DPMPTSP BAPPEDA, DINASPERINDAG, KOPERASI DAN UMKM, BAPENDA, DPTHBun, DKP, ESDM, DISHUT, DLHP, DPPI, DINAS KEBUDPAR, BALITBANGDA, BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, DPMK, BIRO HUKUM.

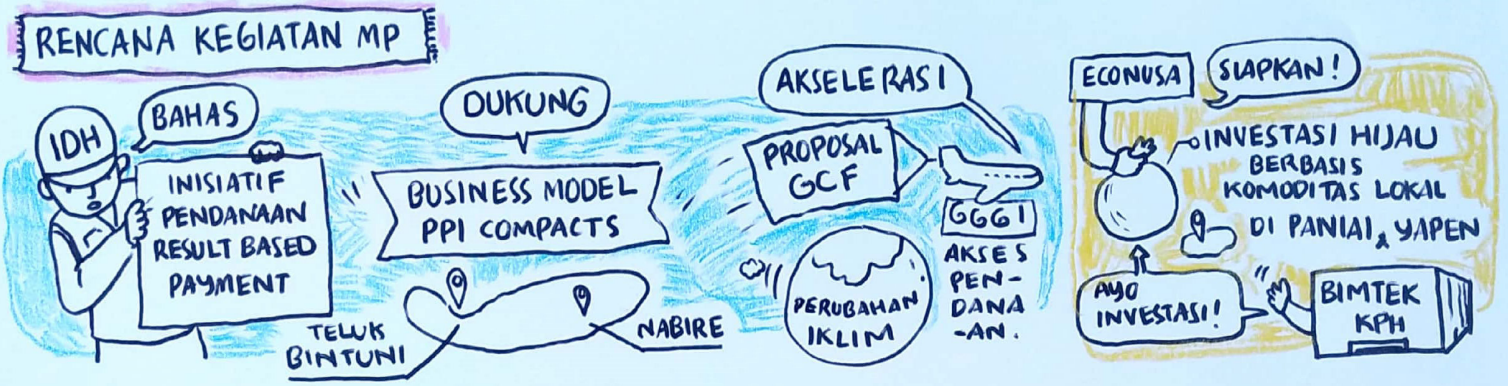

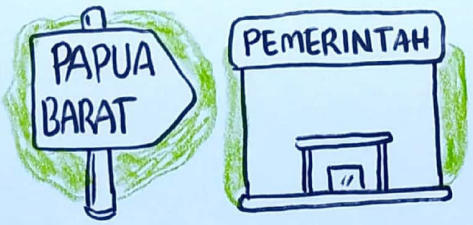

DINAS KEHUTANAN DAN KOMDA, BIRO PEREKONOMIAN, DPMPTSP, BAPPEDA, DINASPERINDAG, KOPERASI DAN UMKM, BAPENDA, DPTHBun DKP, ESDM, DISHUT, DLHP, DPPI, DINAS KEBUDPAR, BALITBANGDA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, DPMK, BIRO HUKUM.

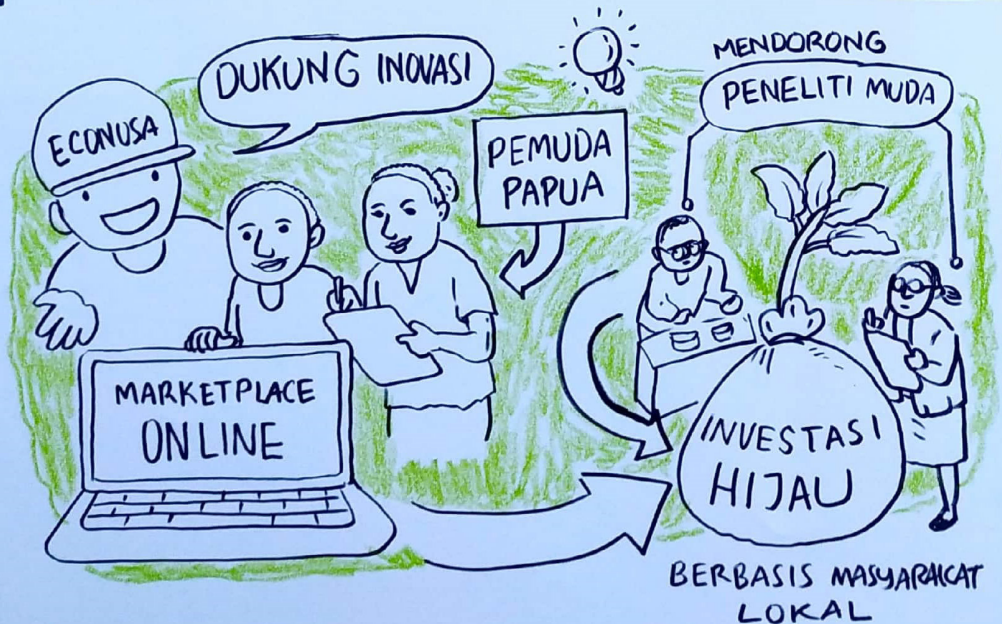

DINAS KEHUTANAN DAN KOMDA, BIRO PEREKONOMIAN, DPMPTSP, BAPPEDA, DINASPERINDAG, KOPERASI DAN UMKM, BAPENDA, DPTHBun, DKP, ESDM, DISHUT, DLHP, DPPI, DINAS KEBUDPAR, BALITBANGDA, BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, DPMK, BIRO HUKUM.

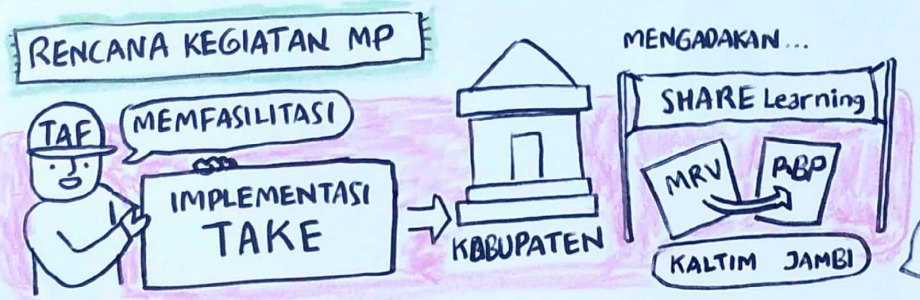

KEMENKO MARITIM DAN INVESTASI, KKP, PARIWISATA, BPKM, KEMENKOPEREK, KEMENTAN, KOPERASI UKM, KEMENDAG, BAPPENAS / DESK PAPUA, KEMENKEU KLHK.

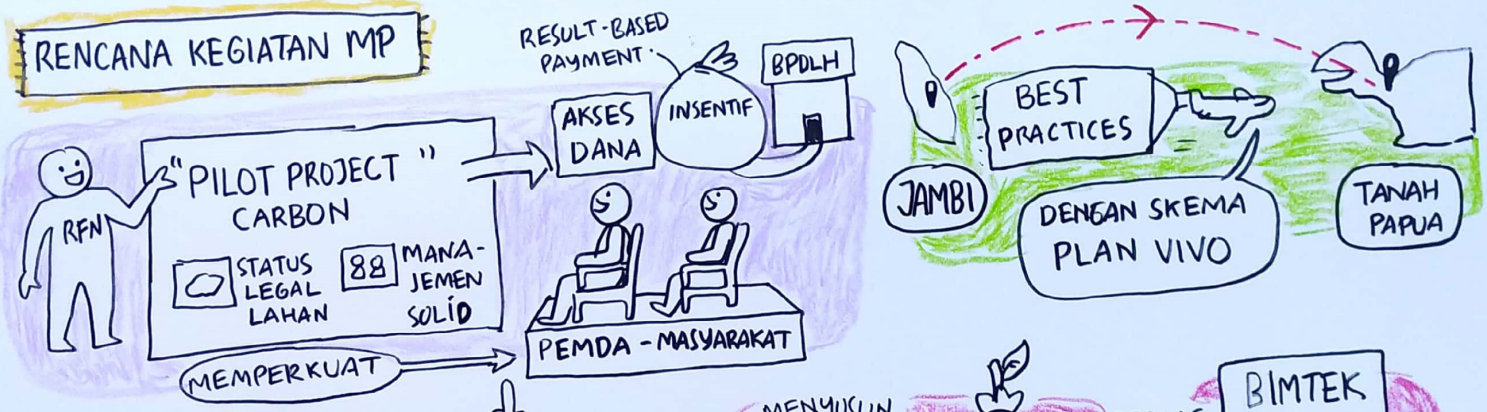

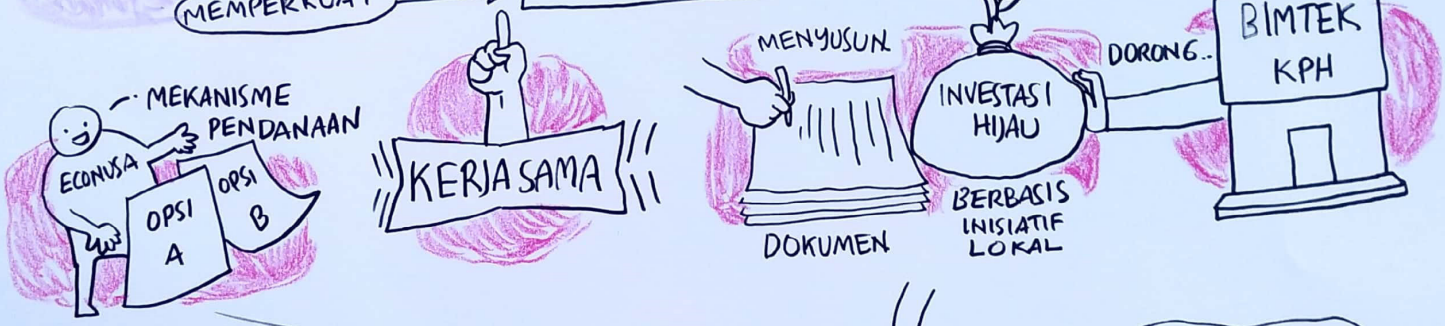

PENGARUSUTAMAAN RENCANA PERTUMBUHAN HIJAU

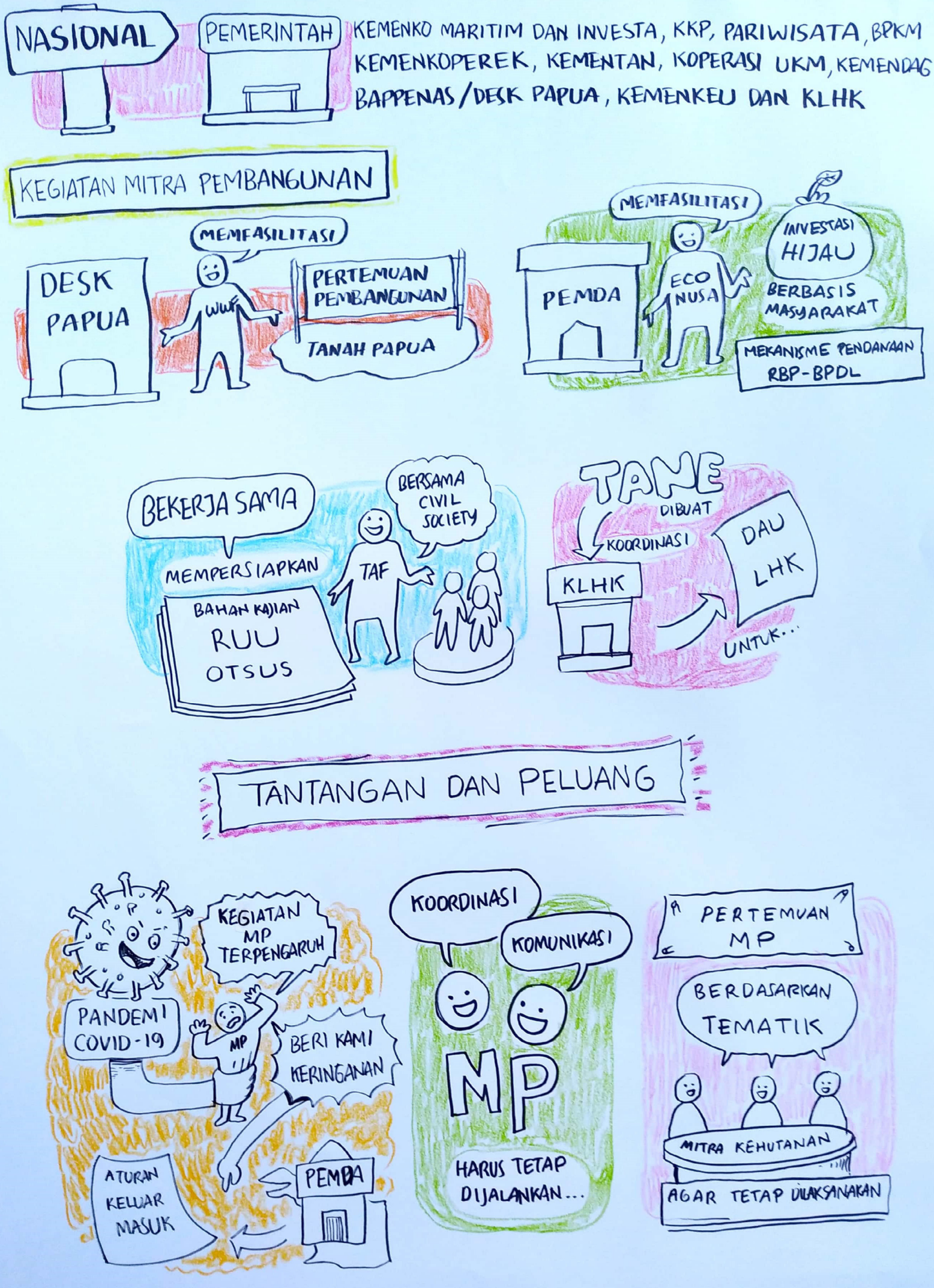
NASIONAL
PEMERINTAH
KEMENKO MARITIM DAN INVESTA, KKP, PARIWISATA, BPKM
KEMENKOPEREK, KEMENTAN, KOPERASI UKM, KEMENDAG
BAPPENAS/DESK PAPUA, KEMENKEU DAN KLHK
KEGIATAN MITRA PEMBANGUNAN
DESK PAPUA
MEMFASILITASI
WWF
PERTEMUAN PEMBANGUNAN
TANAH PAPUA
MEMFASILITASI
PEMDA
ECO NUSA
INVESTASI HIJAU
BERBASIS MASYARAKAT
MEKANISME PENDANAAN
RBP-BPDL
BEKERJA SAMA
MEMPERSIAPKAN
BAHAN KAJIAN
RUU OTSUS
TAF
BERSAMA CIVIL SOCIETY
TANE
DIBUAT
KOORDINASI
KLHK
DAU LHK
UNTUK...
TANTANGAN DAN PELUANG
PANDEMI COVID-19
KEGIATAN MP TERPENGARUH
MP
BERI KAMI KERINGANAN
ATURAN KELUAR MASUK
PEMDA
KOORDINASI
KOMUNIKASI
MP
HARUS TETAP DIJALANKAN...
PERTEMUAN MP
BERDASARKAN TEMATIK
MITRA KEHUTANAN
AGAR TETAP DILAKSANAKAN

CLUSTER 4

<table>
<tr><td>Topik besar bahasan</td><td colspan="2">• Membangun kerja sama secara global, nasional dan lokal dan mekanisme koordinasi untuk berkaitan dengan praktek berkelanjutan terkait laut dan pesisir
• Komitmen untuk melindungi hak dan memperkuat peran Masyarakat Hukum Adat berkaitan dengan keberadaan, tata kelola, dan wilayah kelola perairan adat
• Komitmen untuk penetapan kawasan dan/atau koridor konservasi perairan.</td></tr>
<tr><td>OPD yang terlibat</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Mitra Pembangunan dan CSO yang terlibat</td><td colspan="2">YKAN, CI, WWF, WRI, USAID-SEA, EcoNusa, Bentara</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Siapa dari pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat</td><td>Pemerintah Pusat</td><td>Pemerintah Daerah</td></tr>
<tr><td>1. KKP
2. Kemendagri
3. Kemenko Marves
4. KLHK
5. Kemenparekraf
6. ESDM/BPMIGAS
7. PSDKP
8. Loka PSPL Sorong</td><td>1. DKP PB
2. Dinas Perikanan Kabupaten
3. Dinas Pariwisata Kabupaten
4. BLUD UPTD KKP Raja Ampat
5. UPTD KKP Kaimana-FakFak
6. Bappeda PB
7. Balitbangda PB
8. Universitas/Perguruan Tinggi
9. BBKSDA PB
10. Biro Hukum
11. DPRD dan MRP
12. Dinas Perhubungan
13. Balai Besar Taman Nastional Cendewasih
14. Dinas Kehutanan PB
15. Dinas Perindakop PB
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Provinsi dan Kabupaten)
17. Dinas Pendidikan Kabupaten
18. Dinas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
19. Kanwil Kemenkumham PB
20. Polisi Air (POLAIR)
21. TNI AL
22. Pengadilan Perikanan
23. Kejaksaan</td></tr>
<tr><td>Rencana/agenda/ kebijakan 6 bulan kedepan yg perlu dilakukan</td><td>Conservation International Indonesia:
1. Mendorong perbaikan penguatan kelembagaan jejaring Kawasan Konservasi Perairan yang efektif</td><td>EcoNusa
1. Ekowisata
2. Komoditi (best practices)
3. Supply chain (kopi, kepiting bakau, rumput laut, ikan karang)</td></tr>
</table>

	2. Memperkuat kapasitas staf dan lembaga pengelola Kawasan Konservasi Perairan (UPTD) 3. Menyiapkan BLUD sebagai Pola Pengelolaan Keuangan pada lembaga pengelola Kawasan Konservasi Perairan 4. Pendanaan Kawasan Konservasi Perairan 5. Save guard konservasi 6. Mengembangkan model perikanan berbasis masyarakat 7. Memperkuat kapasitas DKP Provinsi PB dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan 8. Advokasi DKP PB terkait rencana perluasan lokasi eksploitasi MIGAS yang bertentangan dengan PERDA RZWP3K Papua Barat	4. Kampung Iklim (Kaimana dan Raja ampat) 5. Blue carbon – kabupaten pilot (Kaimana dan Raja Ampat) 6. Membangun pergerakan dan kapasitas anak muda cinta laut Papua Barat
	Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN): 1. Memperkuat Praktek tradisional dalam menjaga lingkungan (sasi) di Raja Ampat 2. Memperkuat pengelolaan Perikanan masyarakat lokal (Raja Ampat) 3. Memperkuat Kelompok-kelompok usaha masyarakat (community livelihood) – Raja Ampat 4. Inisiasi pembentukan Kawasan Konservasi Peraiaran Baru sesuai alokasi ruang dalam RZWP3K Papua Barat 5. Pengembangan Ekowisata berbasis masyarakat (Raja Ampat) 6. Pendampingan Pemerintah Kampung dan Penguatan BUMKAM – Raja Ampat	**USAID-SEA Project:** 1. Memfasilitasi DKP PB untuk RanPergub – turunan Perda RZWP3K (RenPergub: penetapan izin lokasi dan izin pengelolaan WP3K, pengawasan pengelolaan WP3K, peran serta MHA dalam pengelolaan WP3K di Papua Barat 2. Penyusunan Pergub untuk pengelolaan perikanan ikan terbang di FakFak dan ikan puri di Misool 3. Advokasi Bappeda dan DKP PB terkait konsistensi RPJMD, Renstra dan RKPD OPD 4. Menfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Penangkapan Ikan Destruktif di Provinsi Papua Barat.
	Bentara: 1. Ketahanan pangan (Salawati) 2. Pertanian berkelanjutan	

	Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat
Dukungan yang dibutuhkan Mitra Pembangunan	1. Advokasi 2. Regulasi 3. Pendanaan bersama 4. Data/informasi 5. Jaringan pasar 6. Promosi 7. Penguatan Kapasitas/pendampingan

CLUSTER 4 (ISU BENTANG LAUT)

CONSERVATION INTERNATIONAL INDONESIA

6 BULAN KE DEPAN

PERBAIKAN PENGUATAN
YANG EFEKTIF
KELEMBAGAAN JEJARING
8 KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

MEMPERKUAT KAPASITAS...
STAF LEMBAGA PENGELOLA
UPTD

MENYIAPKAN..
BLUD
SEBAGAI
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
PADA...
LEMBAGA PENGELOLA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Rp PENDANAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

SAFEGUARD KONSERVASI

MENGEMBANGKAN MODEL PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT.

PERKUAT KAPASITAS
DKP PROVINSI PAPUA BARAT
PENGELOLAAN
ADVOKASI
RENCANA PERLUASAN LOKASI EKSPLOITASI MIGAS
KUS
PERDA RZWP3K PAPUA BARAT

ECONUSA

ECOWISATA

KOMODITI
BEST PRACTICES

SUPPLY CHAIN
KOPI
KEPITING BAKAU
RUMPUT LAUT
IKAN KARANG

KAMPUNG IKLIM
KAIMANA
RAJA AMPAT
KABUPATEN PILOT
BLUE CARBON

MEMBANGUN PERGERAKAN & KAPASITAS
CINTO LAUT
PAPUA BARAT
ANAK MUDA

YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA

MEMPERKUAT PRAKTIK TRADISIONAL DALAM MENJAGA LINGKUNGAN
RAJA AMPAT
SASI

MEMPERKUAT PENGELOLAAN PERIKANAN MASYARAKAT LOKAL (RAJA AMPAT)

MEMPERKUAT
KELOMPOK - KELOMPOK USAHA MASYARAKAT (RAJA AMPAT)

INISIASI PEMBENTUKAN...
KONSERVASI KAWASAN PERAIRAN BARU
SESUAI ALOKASI RUANG
RZWP3K PAPUA BARAT

PENGEMBANGAN...
EKOWISATA
BERBASIS MASYARAKAT
RAJA AMPAT

PENDAMPINGAN
PEMERINTAH KAMPUNG
RAJA AMPAT

PENGUATAN
BUMIKAM

SEA PROJECT

FASILITASI
DKP PB
UNTUK
R2WP3K
RanPergub

IZIN LOKASI & IZIN PENGELOLAAN WP3K
PENGAWASAN PENGELOLAAN WP3K
PERAN SERTA MHA DALAM PENGELOLAAN WP3K DI PB.

PENYUSUNAN...
PERGUB
PENGELOLAAN PERIKANAN
IKAN PURI
IKAN TERBANG
MISOOL
FAKFAK

ADVOKASI...
DKP BB
BAPPEDA
KONSISTENSI
RPJMD
RENSTRA
RKPD OPD

FASILITASI PENYUSUNAN..
RAD
PB
PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN DESTRUKTIF

BENTARA

KETAHANAN PANGAN (SALAWATI)

PERTANIAN BERKELANJUTAN

PEMERINTAH

KKP, KEMENDAGRI, KEMENKO MARVES, KLHK, KEMENPAREKRAF, ESDM/BPMIGAS, PSDKP, LOKA PSPL SORONG.
DKP PB, DINAS PERIKANAN KABUPATEN, DINAS PARIWISATA KABUPATEN, BLUD UPTD KKP RAJA AMPAT, UPTD KKP KAIMANA FAKFAK, BAPPEDA PB, BALITBANGDA PB, UNIVERSITAS/PT, BBKSDA PB, BIRO HUKUM, DPRD DAN MRP, DINAS PERHUBUNGAN, BALAI BESAR TAMAN NASIONAL CENDRAWASIH, DINAS KEHUTANAN PB, DINAS PERINDAKOP PB, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG, DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN, DINAS PTSP, KANWIL KEMENKUMHAM PB, POLAIR, AL, PENGADILAN PERIKANAN, KEJAKSAAN.

DUKUNGAN UNTUK MP

ADVOKASI

REGULASI

PENDANAAN BERSAMA

DATA INFORMASI

JARINGAN PASAR

PROMOSI

PENGUATAN KAPASITAS PENDAMPINGAN

PENUTUPAN

SEMUA KERJA KITA

PERHATIKAN INTEGRASI LANDSCAPE

HASIL DISKUSI 2 HARI INI..

DOKUMENTASIKAN

FOLLOW UP!!

EVALUASI KERJA 2 TAHUN

BEKAL 2021

Kontak Person Mitra Pembangunan

No	Nama Lengkap	Instansi / Lembaga	Alamat Email	No Telepon
1	Juliarta Bramansa Ottay	Rainforest Foundation Norway	Arta@rainforest.no	081251957720
2	Prof. Dr. Charlie D. Heatubun	Balitbangda Provinsi Papua Barat	charlie_deheatboen@yahoo.com	081219961973
3	Heru Komarudin	Center for International Forestry Research (CIFOR)	h.komarudin@cgiar.org	08121168397
4	Blair Palmer	Papua Spatial Planning Program, LEI	blair@landequity.com.au	08119950564
5	Amos Sumbung	Greenpeace	asumbung@greenpeace.org	0811486327
6	Julia Kalmirah	WRI Indonesia	julia.kalmirah@wri.org	08119271516
7	Imam Setiawan	Bentara Papua	imamsetiawan.bentara@gmail.com	08113945080
8	Asiman Manik, S.Hut, M.Si	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	asimanmnk@gmail.com	081344020495
9	Saz Kodri	YIDH	kodri@idhtrade.org	082167325885
10	Renny Suruan	PERDU Manokwari	rennysuruan@gmail.com	082248356538
11	Erman A. Rahman	The Asia Foundation	erman.rahman@asiafoundation.org	0811141880
12	Cindy Kasenda	Bappeda Provinsi Papua	ckkasenda@gmail.com	085105124961
13	Abimanyu S. Aji	Kemitraan	abimanyu.aji@kemitraan.or.id	082165120204
14	Nicodemus Y. Wamafma	Greenpeace SEA Indonesia	nwamafma@greenpeace.org	082197585110
15	Lukas Rumetna	Yayasan Konservasi Alam Nusantara	lrumetna@ykan.or.id	08124836182
16	Mohammad Agus Salim	Wawasan	asalim@wawasan.co.id	08111197022
17	Chris Rotinsulu	USAID SEA	chris.rotinsulu@sea.indonesia.org	08111712751
18	Elen Bless	GGGI	elen_blss@yahoo.com	082239386470
19	Dewi Rizki	KEMITRAAN	dewi.rizki@kemitraan.or.id	08118453112
20	Imelda Sihombing	Land Equity International (LEI)	imelda@landequity.com.au	08111550185
21	Yunus Yumte	Samdhana	papua_y@yahoo.com	085215427814
22	JOHN MOESIERI	Pokja RAD GRK Prov. Papua	moesierijohn@gmail.com	082197784593
23	Mei Meilani	Inobu	mmeilani@inobu.org	081282253874
24	Benja V Mambai	WWF-ID	bmambai@wwf.id	08111813443
25	Jeannet Weismann	Daemeter Consulting / PSP Program	Jean.weismann@daemeter.org	081334187946
26	Rio Albert	CLUA	rio.pangemanan@clua.net	082122248880
27	Octyanto Bagus Indra Kusuma	Kedutaan Norway	octyanto.bagus.indra.kusuma@mfa.no	081297650093
28	Irma Herwanti	FFI	Irmabetelguise@gmail.com	082258130003
29	Mohammad Sidiq	FORCLIME, GIZ INDONESIA	mohammad.sidiq@giz.de	
30	Abner Mansai	Sekretariat FOKER LSM Papua	mansaiabner@yahoo.com	081295191152
31	Ria Mariamah	UKCCU	Riayaa@gmail.com	081238039101
32	Meity Mongdong	Conservation International	mmongdong@conservation.org	0811485622
33	asri joni	ICRAF	a.joni@cgiar.org	081363301502
34	Jemmy Manan	The Asia Foundation	jemmymanan@gmail.com	08114851373
35	Marco Wattimena	GGGI	marthinus.wattimena@gggi.org	082248998604
36	Ayu Anugrah Ramanadia	(GEGPP)	ayu.ramanadia@niras.com	081310595401
37	Cindy simangunsong	Econusa	cindy@econusa.id	081311509621

KUMPULAN PRESENTASI

Pada bagian ini akan memberikan ringkasan singkat hasil presentasi dari para pemateri apabila ingin mendapatkan dengan mengunduh dengan meng .klik pada alamat berikut ini:
https://drive.google.com/drive/folders/1dyxNULjf5dJmMIhsE244LvUbGJtiyW0w?usp=sharing

Arahan Gubernur Papua Barat disampaikan oleh Sekretaris Daerah Papua Barat

Pada saat ini kita berkesempatan untuk melaksanakan rapat koordinasi gabungan kedua provinsi, Provinsi Papua Barat dan Provinsi papua. mari kita manfaatkan secara optimal kesempatan berharga ini untuk mengindentifikasi perkembangan capaian pelaksanaan deklarasi manokwari kedua provinsi dan memperkuat peran dan dukungan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan kita bersama, tujuan pembangunan berkelanjutan di tanah papua.

Sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim, Indonesia telah berkomitmen kepada dunia Internasional untuk menurunkan emisi tahun 2030 sebanyak 29% dengan upaya sendiri 41% dengan bantuan pihak asing. dalam RPJMN 2020 -2025 juga pihak Pemerintah RI telah mengarusutamakan pembangunan rendah karbon ke dalam agenda pembangunan ke-6 Pemerintah RI. kedua Provinsi Papua Barat dan Provinsi papua telah turut mengambil bagian penting dengan menjadi 2 provinsi pilot pelaksanaan perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK) melalui penandatanganan mou dengan Menteri PPN/Bappenas pada tahun 2019 yang lalu. penerapan PPRK di provinsi papua barat sedang berlangsung dan kita sudah berhasil menyusun kerangka kerja pprk di tingkat provinsi.

dalam upaya kita memenuhi komitmen Deklarasi Manokwari, saat ini provinsi Papua Barat sedang melakukan proses revisi dokumen RTRWP Papua Barat. kita terus berupaya untuk mencapai komitmen 70% kawasan darat yang dilindungi dimana saat ini kita sudah mencapai level 54%. proses ini membutuhkan kerja sama dan yang besar dari berbagai pemangku kepentingan dan kontribusi dari berbagai proses yang juga sedang berjalan paralel. kita sedang melakukan evaluasi perizinan khususnya perizinan perkebunan kelapa sawit berdasarkan mandat deklarasi manokwari, inpres moratorium sawit, dan mandat koridor gerakan nasional penyelamatan – sumber daya alam dari KPK. saat ini proses evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit dimandatkan kepada dinas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan provinsi papua barat dan sudah sampai

kepada proses klarifikasi data. hasil dari proses evaluasi perizinan ini dapat kita kontribusikan ke dalam proses pencapaian komitmen 70% kita. begitu juga dengan proses pemetaan wilayah adat yang sedang berjalan.

RPJMD 2017 – 2022 Provinsi Papua Barat juga sedang dikaji, dengan fokus sasaran yaitu: memperbaharui data pembangunan (aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah); evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah; evaluasi terhadap permasalahan dan dinamika isu strategis daerah; evaluasi terhadap kapasitas fiskal dan kerangka pendanaan; evaluasi pencapaian program pembangunan daerah; dan evaluasi pencapaian indikator kinerja. selain itu konsep ekonomi hijau, persiapan trust fund untuk konservasi alam serta peran serta masyarakat adat dalam pengambilan keputusan juga menjadi agenda bersama ke depan

Tantangan besar lain yang dihadapi kita saat ini adalah penanganan dan pemulihan sosial ekonomi akibat pandemi covid 19 kecepatan kita menangani pandemi menentukan potensi pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelahnya. pasca pandemi roda perekonomian dan aktivitas masyarakat diharapkan kembali normal: pembatasan sosial berakhir, usaha masyarakat dan pasar beroperasi lagi. ini adalah tantangan besar kita, ini kerja besar kita, ini langkah besar papua barat untuk pembangunan berkelanjutan, saya berterima kasih kepada semua pihak yang sudah berkolaborasi secara harmonis selama ini. kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri, kolaborasi dan kerjasama, melalui berbagai inovasi adalah hal yang tidak bisa ditawar demi kemajuan daerah.

Pertemuan ini diharapkan dapat membuahkan beberapa hasil: pertama, adanya informasi kemajuan dukungan dan kerjasama yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan oleh mitra pembangunan dan lsm di Tanah Papua dalam implementasi Deklarasi Manokwari; kedua, tindak lanjut, arahan dukungan dan kerjasama mitra pembangunan yang dikoordinasikan oleh OPD terkait, dan ketiga informasi dukungan pendanaan dan teknis terhadap agenda-agenda yang relevan dengan masing-masing mitra pembangunan, terutama peran aktif mitra lokal dalam setiap kegiatan. sehingga menjadi hal penting dalam pengambilan kebijakan yang lebih terarah terutama peningkatan kesejahteraan orang asli papua dan masyarakat adat serta perbaikan tata pengelolaan sumberdaya alam di masa mendatang baik di Papua Barat maupun di Provinsi saudara kami, Provinsi Papua.

Saya ingin mengingatkan kembali bahwa tugas utama kita semua adalah **“mewariskan mata air bagi anak cucu kita bukan sebaliknya mewarisi air mata bagi mereka”** dan Tanah Papua akan menjadi inspirasi dan contoh bagi dunia, dan itu dimulai dari kita.

graphic recorder :

PERTEMUAN KOORDINASI VIRTUAL

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA & PAPUA BARAT
BERSAMA
MITRA PEMBANGUNAN

· 14-15 JULI 2020 ·

Pembukaan

BAPAK NATANIEL D. MANDACAN
Sekda Pemerintah Provinsi Papua Barat

"HUTAN TROPIS LESTARI.."

PAPUA BARAT - PAPUA

TUJUAN BERSAMA

MENGANTARKAN KEBERLANJUTAN PROVINSI UNTUK KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA...

DAN..
EKOSISTEMNYA

DEKLARASI MANOKWARI 2018

NOTA KESEPAHAMAN
2019

PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

PROVINSI PILOT

KOMITMEN MENURUNKAN EMISI KARBON

29% SENDIRI
41% INTERNASIONAL

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

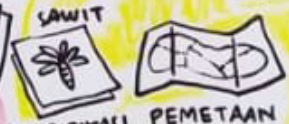

ASPEK TUJUAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

KONSEP EKONOMI HIJAU

TRUST FUND

STRATEGI TINDAK LANJUT DISEPAKATI.

BUTIR 2 DEKLARASI MANOKWARI DI TANAH PAPUA

TER-SAM-PAI-KAN

INFORMASI PERKEMBANGAN

IDENTIFIKASI TANTANGAN & PELUANG

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TANAH PAPUA

RENCANA PROGRAM

MITRA PEMBA-NGUNAN

&

PEME-RINTAH

TERSINKRONISASI

Arahan Gubernur Papua Disampaikan Oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejateraan Rakyat Provinsi Papua

Inisiatif yang digagas oleh forum Mitra Pembangunan yang secara optimal terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat dengan para pemangku kepentingan. pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat telah mengambil beberapa langkah menjaga kelestarian hutan tropis di Tanah Papua, yaitu dengan menandatangani Deklarasi Manokwari pada tahun 2018 sebagai agenda bersama pemerintah, Mitra Pembangunan, dan para pemangku kepentingan lain dalam mencapai tujuan bersama, yakni mengantarkan keberlanjutan provinsi untuk kesejahteraan Orang Asli Papua, sumber daya alam, dan ekosistemnya.

Tanah Papua secara administratif terdiri dari provinsi papua seluas 319.036 km2 dan provinsi papua barat dengan luas 140.376 km2 dengan jumlah penduduk di tanah papua diperkirakan mencapai 4,3 juta jiwa pada tahun 2019. Tanah Papua dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan sumber daya alam yang melimpah, ekosistem yang sangat beragam, dari wilayah pesisir, terumbu karang, hutan dataran rendah, hutan dataran tinggi hingga gletser tropis. keanekaragaman hayati di tanah papua menyumbang setengah dari total keanekaragaman hayati indonesia, banyak spesies fauna dan flora yang unik dan tidak ditemukan di mana pun. selain itu Tanah Papua kaya sumber daya alam seperti hasil tambang, minyak, dan mineral penting. keanekaragaman budaya dan tradisi penduduk asli adalah kekayaan lain dari Tanah Papua. ada sekitar 265 bahasa lokal yang di-identifikasi menjadi suku asli dengan kearifan lokal yang telah diwariskan selama bertahun-tahun lamanya.

Terlepas dari melimpahnya sumber daya alam di tanah papua, provinsi papua dan papua barat termasuk provinsi termiskin di Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) papua tahun 2019 yaitu 60,84 dan IPM Provinsi Papua Barat yaitu 64,70. pemerintah telah meluncurkan program pembangunan sosial-ekonomi untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Namun, karena infrastruktur yang terbatas, industri publik dan sektor jasa yang belum berkembang dan berkontribusi lebih sedikit pendapatan daerah. Hal ini berdampak pada inisiatif pembangunan berfokus pada eksploitasi sumber daya alam berbasis lahan, seperti pertambangan, kehutanan, dan pertanian. terlepas dari beberapa kemajuan nyata dalam pembangunan ekonomi, tampak tidak selalu terkait langsung atau memberikan

peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat setempat; namun juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak kepada perubahan iklim.

Langkah besar Papua dan Papua Barat untuk pembangunan berkelanjutan, kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri, kolaborasi dan kerjasama, melalui berbagai inovasi adalah hal yang tidak bisa ditawar demi kemajuan daerah.

Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa telah ada penyatuan visi bersama tanah papua yaitu Tanah Papua damai, berkelanjutan, lestari dan bermartabat. Berdasarkan hasil *International Conference on Biodiversity and Ecotourism* (ICBE) yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang dituangkan dalam deklarasi manokwari, komitmen tersebut diwujudnyatakan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Pembangunan Berkelanjutan dengan berbasis konservasi dan pengakuan hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua, dimana Deklarasi Manokwari merupakan dasar dan arahan utama dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Terdapat 14 butir komitmen yang telah kita sepakati bersama dan itu adalah komitmen kita semua baik pemerintah daerah, mitra pembangunan dan masyarakat untuk terus mengawal butir-butir Deklarasi Manokwari. kegiatan ini tentunya untuk refleksi terhadap semua capaian yang telah dihasilkan pasca ditetapkannya Deklarasi Manokwari sebagai konsep dan inisiatif provinsi berkelanjutan sebagai solusi cerdas pembangunan.

Penting untuk meninjau kembali capaian dari konferensi ICBE 2018 di Manokwari sekaligus menemukan strategi pembangunan pasca pandemi COVID-19, maka kami berencana untuk menyelenggarakan ICBE tahun 2021 diselenggarakan di jayapura provinsi papua. yang mengambil tema **"Pembangunan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat melalui Pelestarian Keanekaragaman Hayati, Pemanfaatan Jasa Lingkungan (PES) dengan Partisipasi Aktif Masyarakat Adat di Tanah Papua".**

Pembangunan Berkelanjutan di PROVINSI PAPUA

BAPAK MUHAMMAD MUSAAD

Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Papua Bidang Perekonomian & Kesejahteraan Rakyat

KOMITMEN

- RPJMD
- RPJPD
- RKPD
- RTRW
- KLHS

DOKUMEN PERENCANAAN

AKTUALISASIKAN

PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PEMBANGUNAN EKONOMI Hijau

90% KAWASAN HUTAN

60% KAWASAN LINDUNG

"SEMUA HUTAN DI PAPUA BERTUAN"

HARUS ADA JAMINAN

KONDISI HUTAN DITENTUKAN OLEH KEBERLANGSUNGAN HIDUP YANG ADA DI HUTAN...

TANTANGAN!

RESMI & TIDAK RESMI

PERKE-BUNAN

ILEGAL LOGGING

HARUS DITEKAN

ISU-ISU:

- DEFORESTASI DEGRADASI LAHAN
- BERKURANGNYA KEANEKARAGAMAN HAYATI
- BENCANA ALAM (AIR BAH, BANJIR)
- PENANGANAN LIMBAH SAMPAH
- EFEK GAS RUMAH KACA MENINGKAT
- COVID-19

KITA BUTUH GERAKAN BERSAMA

DUKUNGAN MITRA

PPRK

PILOT PROVINSI

SECARA KUALITATIF BELUM TERLIHAT

JANGAN CUMA SAMPAI KALIMANTAN

INDONESIA

NORWEGIA

SUARAKAN

GERAKAN PAPUA NASIONAL..

DI LEVEL

KOMITMEN

TANAH PAPUA SEBAGAI ...

Paru-Paru DUNIA

DI LEVEL INTERNASIONAL

Pengantar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua

Refleksi capaian Deklarasi Manokwari 2018 Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, kelestarian lingkungan, manfaat dan keadlilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Dengan mengurangi ketimpangan pembangunan, kewenangan yang luas dalam NKRI tetapi tanggung jawab yang lebih besar, memberikan kesempatan luas bagi OAP serta kualitas hidup yang lebih baik bagi orang Papua.

Upaya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen perencanaan daerah melaluli dokumen pendukung maupun dokumen wajib dan inisitif daerah. Pembangunan Papua ke depan juga mengacu pada **konsep ekonomi hijau** dalam konteks implementasi dan pencapaian pembangunan berkelanjutan Konsep & prinsip pembangunan berkelanjutan di Papua mengarahkan keseimbangan antara pencapaian ekonomi yang memperhitungkan kondisi sosial dan lingkungan, dengan upaya perbaikan tata kelola.

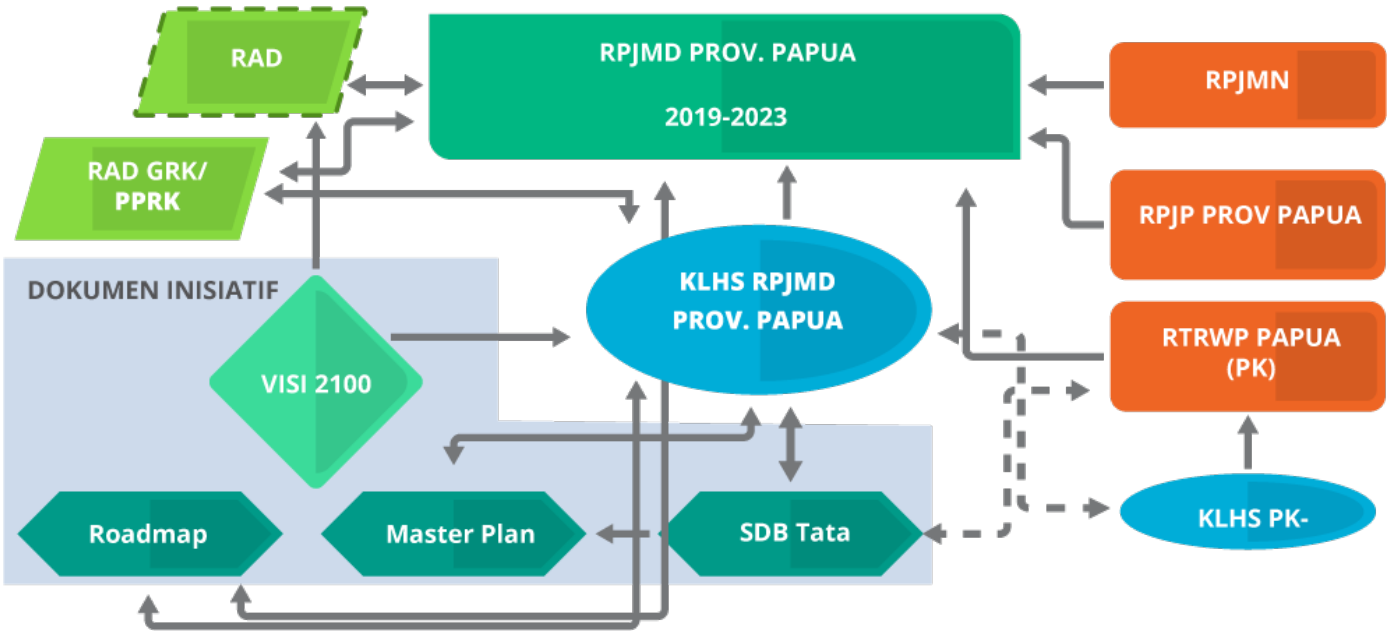

BAPAK YOHANES WALILO
KEPALA BAPPEDA PAPUA

Pembangunan Berkelanjutan

PROVINSI PAPUA

PAPUA & PAPUA BARAT HARUS LEBIH BAIK DARI HARI INI !

KIAT-KIAT PEMBANGUNAN PAPUA

CITA CITA OTSUS PAPUA

UU OTSUS PAPUA 21/2001

- PASAL 63
  - PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
  - KELESTARIAN LINGKUNGAN
  - MANFAAT & KEADILAN
- RTRW

VISI PAPUA 2100

KUALITAS HIDUP

ALAM

> TUJUAN UTAMA <

> SARANA UTAMA <

PENDEKATAN PEMBANGUNAN

5 WILAYAH ADAT

LIHAT POTENSI MASING 2

DIPETAKAN

- RAWA
- LAUT
- PESISIR
- HUTAN
- GUNUNG

PEMERATAAN

PEMBANGUNAN

KARAKTERISTIK ☑

KEWILAYAHAN ☑

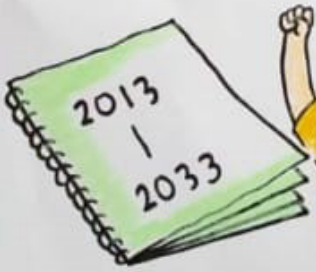

SIAP MENJADI TUAN RUMAH

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

PAPUA

EVALUASI

DEKLARASI MANOKWARI

- ☐ APA YANG SUDAH DILAKUKAN
- ☐ APA YANG HARUS DIPERBUAT

BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA
YANG BERKEADILAN

Pengantar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua Barat

Implementasi Deklarasi Manokwari merupakan hal penting dalam pengambilan kebijakan yang terarah untuk peningkatan kesejahteraan orang asal Papua dan masyarakat adat menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermartabat. Melalui Rapat Koordinasi capaian Implementasi Deklarasi Manokwari antara Pemerintah Daerah Papua Barat dan Mitra Pembangunan diketahui secara menyeluruh bentuk dan dukungan kerja sama yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan Mitra Pembangunan di Papua Barat sehingga koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Daerah Papua Barat dan Mitra Pembangunan menjadi keharusan untuk mewujudkan capaian Deklarasi Manokwari.

Beberapa kegiatan besar yang menjadi agenda di Provinsi Papua Barat saat ini, diantaranya merevisi RT/RW, *Evaluasi* perizinan yang berkaitan dengan lahan hutan. Saat ini dukungan dari mitra pembangunan berdasarkan Deklarasi Manokwari diantaranya tata ruang, ekonomi hijau, pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas baik kelemabgaan maupun regulasi kemudian keterbukaan informasi, pengakuan masyarakat adat dan lain-lain. Ini yang perlu kita lihat sehingga kita dapat membagi peran itu dengan baik perlu juga dipastikan tidak adanya duplikasi atau timpang tindih tetapi adanya berkelanjutan. Juga dipastikan transfer *knowledge, experience*, baik di internal Pemerintah Daerah dan juga mitra lokal. Sehingga semua ini satu tim, tidak ada yang kerja sendiri-sendiri, semua adalah tim besar Papua Barat.

Aktivitas pembangunan tidak hanya dilakukan satu pihak saja mesti melibatkan upaya kolaborasi multi pihak serta pentingnya memetakan dan melihat kembali sumber daya adat di Tanah Papua. Kita tidak mau hutan kita digunakan sebagai modal atau sebagai jaminan pemilik modal perusahaan-perusahaan. Kepemilikan lahan itu perlu dikembalikan ke masyarakat adat. Saat ini kita coba untuk melihat dan mengembangkan komoditas-komoditas lokal baik dan yang berkelanjutan. Provinsi Papua Barat berkolaborasi bersama Mitra Pembangunan untuk berbagi peran dantugas dalam mewujudkan pembanguan berkelanjutan di Tanah Papua agar nantinya saling terkait, saling dukung dan tidak ada tumpang tindih kegiatan. Sehingga kami juga menyampaikan kedalam internal OPD untuk aktif berkolaborasi dalam melakukan kerja-kerja bersama yang sesuai dengan rencana pembanguan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Catatan lainnya adalah banyak hal yang perlu kita benahi dan kolaborasikan kedepannya secara bersama-sama.

Dari hasil kegiatan ini Pemerintah Daerah diharapkan memahami secara menyeluruh bentuk dan dukungan kerjasama yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Mitra Pembangunan di Papua Barat dalam implementasi Deklarasi Manokwari, dimana koordinasi dan harmonisasi internal Pemerintah dan para Mitra Pembangunan menjadi keharusan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di provinsi Tanah Papua.

UPDATE KEGIATAN MITRA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT

Prof. Charlie
Balitbangda Papua Barat

Cluster 1

REVISI RTRW

2020 KONSULTASI BIG

PETA DASAR

INTEGRASI

KLHS

PENJAMINAN MUTU

PEMBAHASAN PERBATASAN KAWASAN KABUPATEN

PETA TEMATIK

SEDANG DISELESAIKAN

± 54% PENCAPAIAN KAWASAN YANG DILINDUNGI

POLA RUANG

TAHAP RASIONALISASI

PETA SEKTORAL OPD

RZWP3K

PERDA

SUDAH DITETAPKAN

SEDANG DISIAPKAN

PENYUSUNAN PERGUB

SEDANG DIDORONG

PEMBENTUKAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH (JIGD)

KEBIJAKAN 1 PETA

PENINGKATAN KAPASITAS OPD

PETA STANDARDISASI

DRAFT PERGUB

PUPR PAPUA BARAT

KONSEP 70% KAWASAN YANG DILINDUNGI

RENCANA..

MEMASUKKAN :

- ☑ HUTAN PRIMER LAHAN KERING
- ☑ HUTAN SEKUNDER LAHAN KERING DI LAHAN SENSITIF
- ☑ MANGROVE PRIMER & SEKUNDER
- ☑ SEMUA LAHAN GAMBUT

DATA SPASIAL

DATA NON SPASIAL

SKEMA PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

SELESAI

EVALUASI PERIZINAN

VERIFIKASI

OPD TERKAIT

PEMEGANG KONSESI

Cluster 2

PEMETAAN WILAYAH ADAT

BUAT PLATFORM

HASIL PEMETAAN PARTISIPATIF

± 3 JUTA HEKTAR

CSO BERKOALISI

DRAF

NASKAH AKADEMIK

PERDA

SUDAH MASUK

DPRD SORONG SELATAN

VERIFIKASI BPSKL & CDK

PENETAPAN KABUPATEN TAMBRAUW

HUTAN DESA

HUTAN ADAT

SEDANG PROSES

MENUNGGU VERIFIKASI LAPANGAN

DATA / INFORMASI PEMETAAN WILAYAH ADAT RAJA AMPAT

TERSEDIA!

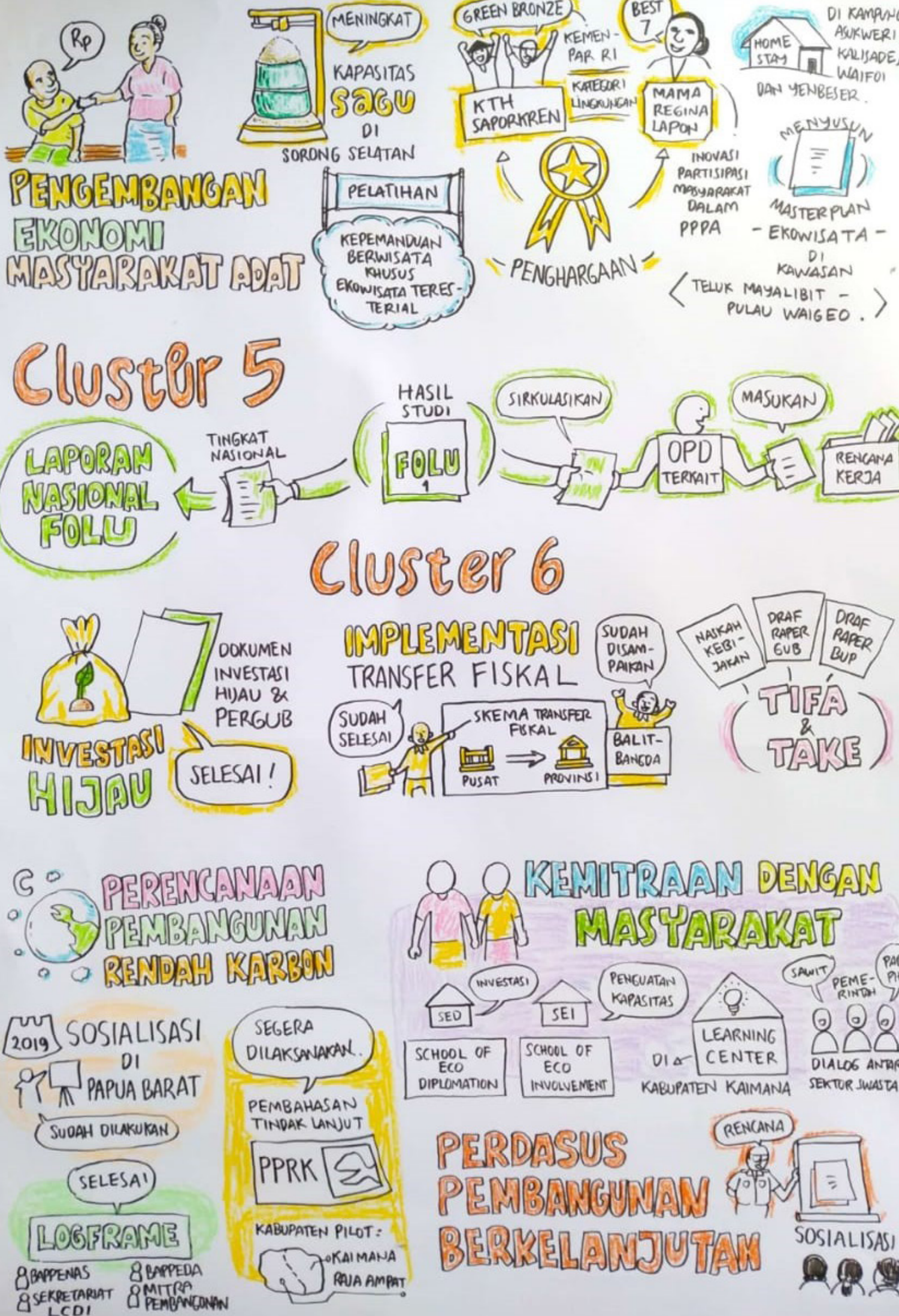
PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT ADAT
Rp
MENINGKAT
KAPASITAS SAGU DI SORONG SELATAN
PELATIHAN
KEPEMANDUAN BERWISATA KHUSUS EKOWISATA TERESTERIAL
GREEN BRONZE
KEMENPAR RI
KATEGORI LINGKUNGAN
KTH SAPORKREN
BEST 7
MAMA REGINA LAPON
PENGHARGAAN
INOVASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PPPA
HOME STAY
DI KAMPUNG ASUKWERI, KALISADE, WAIFOI DAN YENBESER.
MENYUSUN
MASTERPLAN - EKOWISATA - DI KAWASAN TELUK MAYALIBIT - PULAU WAIGEO.
Cluster 5
LAPORAN NASIONAL FOLU
TINGKAT NASIONAL
HASIL STUDI
FOLU
SIRKULASIKAN
OPD TERKAIT
MASUKAN
RENCANA KERJA
Cluster 6
DOKUMEN INVESTASI HIJAU & PERGUB
INVESTASI HIJAU
SELESAI!
IMPLEMENTASI TRANSFER FISKAL
SUDAH SELESAI
SKEMA TRANSFER FISKAL
PUSAT
PROVINSI
SUDAH DISAMPAIKAN
BALITBANGDA
NASKAH KEBIJAKAN
DRAF RAPER GUB
DRAF RAPER BUP
TIFA & TAKE
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON
2019 SOSIALISASI DI PAPUA BARAT
SUDAH DILAKUKAN
SELESAI
LOGFRAME
BAPPENAS
SEKRETARIAT LCDI
BAPPEDA
MITRA PEMBANGUNAN
SEGERA DILAKSANAKAN.
PEMBAHASAN TINDAK LANJUT
PPRK
KABUPATEN PILOT:
KAIMANA
RAJA AMPAT
KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT
SED
INVESTASI
SEI
PENGUATAN KAPASITAS
SCHOOL OF ECO DIPLOMATION
SCHOOL OF ECO INVOLVEMENT
DI KABUPATEN KAIMANA
LEARNING CENTER
SAWIT
PEMERINTAH
PARA PIHAK
DIALOG ANTAR SEKTOR SWASTA
PERDASUS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
RENCANA
SOSIALISASI

Pengantar Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Barat Disampaikan Oleh Kabid Bidang Ekonomi

Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Merupakan perwujudan dari Pemerintah Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan yang telah terlembagakan dalam Perpres No. 18/2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, Pembangunan Rendah Karbon masuk ke dalam Prioritas Nasional ke enam (PN-6), yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Terdapat lima rencana kegiatan pemeritah yang mendukung terwujudnya pelaksanaan pembangunan rendah karbon di Indonesia, yaitu: pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, penanganan limbah, pengembangan industri hijau, serta rendah karbon pesisir dan laut. PPRK merupakan instrumen perencanaan pembangunan yang berfungsi menyeimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta mendukung pencapaian target pembangunan berbagai sektor yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, membantu dalam pencapaian penanganan perubahan iklim, serta mendorong upaya pelestarian lingkungan. Pembangunan Rendah Karbon (PRK) adalah transformasi dari Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dimana Papua Barat sebelumnya telah menerbitkan dokumen RAD GRK pada tahun 2013-2020.

Empat fokus utama PPRK Provinsi Papua Barat:

1. Penyiapan Integrasi Kebijakan PRK di Provinsi Papua Barat
2. Penyusunan Dokumen Rencana PRK Daerah Provinsi Papua Barat
3. Penguatan System Online Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan (PEP)
4. Penyiapan Kegiatan PRK di Papua Barat

BAPPEDA sebagai leading sektor di daerah mengalokasikan APBD pada tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- untuk implementasi PPRK di Provinsi Papua Barat.

BAPAK NIKSON

BAPPEDA PAPUA BARAT

Inisiatif Pembangunan RENDAH KARBON

CO_2

DALAM UPAYA PERWUJUDAN

Provinsi Berkelanjutan

PERPRES NO.18 2020

RPJMN 2020-2024

PRIORITAS NASIONAL KE-6

PRK

INSTRUMEN → PPRK

TRANSFORMASI → RENCANA AKSI DAERAH

TARGET

TURUN 15% 2020

4 Fokus Utama

1. PENYIAPAN INTEGRASI KEBIJAKAN → PRK
2. PENYUSUNAN → DOKUMEN RENCANA PRK DAERAH
3. PENGUATAN → SYSTEM ONLINE (PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN)
4. PENYIAPAN KEGIATAN

VISI MISI PEMBANGUNAN PAPUA BARAT 2017-2022

MISI 2 → PENGELOLAAN LINGKUNGAN, SDA BERKEADILAN BERKELANJUTAN

2019 PPRK → MoU BERSAMA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

IKUT WORKSHOP RAD GRK → PPRKD REGIONAL TIMUR

PPRK → SOSIALISASI

RAPAT VIRTUAL → RENCANA FINALISASI LOGFRAME

ISU STRATEGIS WILAYAH PAPUA BARAT:

3. PROVINSI KONSERVASI
7. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
8. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
9. PENGELOLAAN HUTAN

BAPPEDA MENDUKUNG TERSUSUNNYA DOKUMEN RPRKD 2020

ANGGARAN 200 Juta

"MEMBANGUN DENGAN HATI, MEMPERSATUKAN DENGAN KASIH, MENUJU PAPUA BARAT YANG AMAN, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT"

Diskusi Panel

Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasikan perkembangan capaian hasil Deklarasi Manokwari yang dilakukan dari mitra pembangunan daerah terkait pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua karena selama ini Pemerintah daerah ingin mengetahui mitra melakukan apa, dimana dan sumber dananya darimana. Hal tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

SAMDHANA

Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Tanah Adat Papua berbasis Masyarakat Adat (Domberai, Bomberai, Mae Pago, Saireri, Mamta, La Pago, Anim Ha)

1. Mendorong pemetaan wilayah adat dan pengakuan legal hak masyarakat adat di papua, asset reform dan access reform hak ulayat untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat.
2. Integrasi hak adat masyaraka kedalam perencanaan pembangunan hutan dan lahan di Papua.
3. Mendorong pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbasis komunitas adat.
4. Perspektif gender inklusi sosial dan gerakan pemuda

CIFOR

Dukungan Advokasi ilmiah untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua

1. Penguatan Kelembagaan
2. Tata ruang, pertumbuhan hijau dan pembangunan rendah karbon (No. 1)
3. Investasi berbasis lahan yang bertanggungjawab (No. 1 dan No. 3)
4. Ketahanan pangan dan tata guna lahan (No. 12)
5. Penghidupan masyarakat adat (No. 2, 7 dan 8)
6. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan jenis endemic (No. 6 dan No. 10)

WWF

Papua

- Northern : Progress pemetaan wilayah marga/ adat di Kabupaten Jayapura, kajian-kajian hhbk/ jasa lingkungan, penguatan kelompok comlog, pengusulan ICCAs (Yapen, Jayapura), pengembangan sekolah alam di Rhepang di Kabupaten Jayapura, mendukung implementasi ekowisata di Rhepang Kabupaten Jayapura, mendukung advokasi evaluasi pergub 13

dan 15 Provinsi Papua, mendukung penyusunan RZWP3K

- Southern : advokasi RTRWK Merauke yang mengakomodir koridor Wabubi, mendukung advokasi KLHS KSP Ekonomi di Merauke dan sekitarnya (tahap rekomendasi POKJA), mendukung advokasi KLHS Boven digul dan Mappi bersama USAID Lestari, kajian HCV-RKBA, RPHJP KPHP Bodi (expose KLHK untuk penetapan)
- Lorentz : mendukung advokasi zonasi TNL bersama FKPTNL, Kajian-kajian species KKMB, progress pengusulan KEE Rawabaki Vrienschap bersama USAID Lestari
- West Papua (Tambrauw & Provinsi) : Progress pengusulan Legalitas Perhutanan Sosial, penetapan BUMDES 2 kampung, pengusulan ICCAs seluas 75.000 Ha (sasi adat laut dan darat), Penetapan dokumen RPJMK 2 kampung untuk mendukung kampung hijau, kajian-kajian pemetaan partisipatif, pangan lokal, restorasi, inventarisasi hhbk dan jaslink, mendukung revisi RTRW dan KLHS RTRW Papua Barat (tahap rasionalisasi peta rencana :struktur, pola, KSP), peta dasar asistensi BIG untuk rekomendasi dan peta tematik finalisasi peta KRP, integrasi KLHS & penjaminan kualitas disesuaikan setelah penetapan KRP, follow up validasi
- Kegiatan di tingkat tapak potensial untuk mengembangkan LCDI ditingkat Kabupaten

Papua Barat

- Advokasi penetapan PERDA No 13 tahun 2019 tentang RZWP3K provinsi Papua Barat

Yayasan IDH

Pengarusutamaan Green Growth Plan (GGP) pertumbuhan hijau kepada dokumen RPJMD Provinsi dan APBD di dua provinsi.

- Dokumen Rencana Pertumbuhan Hijau untuk Provinsi Papua dan Papua Barat telah selesai. Dokumen tersebut menguraikan strategi provinsi untuk ekonomi hijau, intervensi yang harus diambil, dan proyeksi dampak dari 2020-2048
- Implementasi skenario Rencana Pertumbuhan Hijau akan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keberlanjutan lanskap baik di Provinsi Papua dan Papua Barat
- Pemerintah Provinsi Papua telah mengakomodasi Rencana Pertumbuhan Hijau ke dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMD)
- Mendukung kerangka hukum pengarusutamaan Rencana Pertumbuhan Hijau di Papua dan Papua Barat

- Pembangunan kapasitas untuk Pejabat Provinsi Papua dalam mengimplementasikan Rencana Pertumbuhan Hijau
- Acara pembelajaran nasional untuk Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat
- Dokumen Cetak Biru Investasi (GIBP) telah dikembangkan dan dibagikan kepada pemerintah, bisnis, dan masyarakat untuk memberikan opsi untuk investasi dalam rantai nilai komoditas potensial
- Dokumen Cetak Biru Investasi Hijau (GIBP) telah menarik bisnis serta pemerintah nasional dan daerah melalui acara tingkat rendah yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Investasi
- Mendukung peningkatan kakao Ransiki kepada pembeli nasional dan internasional.
- Mengeksplorasi kopi di Papua dan bekerja dengan SCOPI untuk melakukan studi pelingkupan dalam rantai pasokan kopi dan acara untuk mempromosikan kopi Papua.
- Studi baseline risiko deforestasi di Papua dan Papua Barat dikembangkan
- Perlindungan sosial untuk produksi komoditas berkelanjutan telah berhasil dikembangkan
- Pilot Percontohan model bisnis PPI sedang berlangsung di Teluk Bintuni (Papua Barat) dan Nabire (Papua) dengan sektor swasta dan organisasi lokal.

USAID-SEA

1. Perda Papua Barat No. 13 Tahun 2019 RZWP3K Provinsi Papua Barat (WWF)
2. Mendukung Penetapan KKP Taman Pesisir Fakfak (350.000 ha) CI
3. Mendukung Kajian KKP Taman Pesisir Fakfak (CI)
4. Mendukung Pengembangan KKP Sorong Selatan (338,000 ha) WWF
5. Mengembangkan panduan kriteria design biofisik jejaring KKP BHS MPA (TNC)
6. Mendukung perbaikan pengelolaan Perikanan (FIP Udang untuk Sorong Selatan, Registrasi Perahu < 5GT) WWF, UKIP, RARE
7. Mendukung Pengembangan Rencana Pengelolaan Perikanan Puri dan Perikanan Ikan Terbang (UNIPA, UKIP, NOAA)
8. Mendukung Pengembangan Kawasan Perikanan Adat di Raja Ampat (RARE)
9. Mendukung Pengembangan Pengelolaan Perikanan Tradisional di Teluk Bintuni (WWF)
10. Memperkuat kader konservasi tingkat local untuk kampanye perubahan perilaku (Champion / Pejuang Laut)

GIZ

1. Berdasarkan konsultasi G2G dan proses negosiasi, ada komitmen baru penambahan untuk FORCLIME untuk tahun 2021-2023 dengan mandat untuk mendukung Indonesia Timur (tanah Papua dan Sulawesi).

2. Kementerian Kerjasama dan Pengembangan Republik Federal Jerman (BMZ) telah menginstruksikan dan menyediakan dana bagi GIZ untuk memulai misi penilaian (appraisal mission) di Sulawesi, Papua Barat dan Papua.

3. Kegiatan appraisal proyek telah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari sd 3 Februari 2020. Pada tanggal 3 Februari 2020 tersebut telah dilaksanakan workshop di tingkat nasional dan mendapatkan Implementation Agreement dari Biro Perencanaan, KLHK.

PSP

Durasi program 40 bulan : September 2019 – Desember 2020

- Mengakomodir 70% luas daratan sebagai kawasan lindung dan intergasi wilayah adat ke dalam RTRW
- Penataan izin industri berbasis lahan melalui penguatan dan pemanfaatan sistem informasi geospasial
- Peningkatan kapasitas SDM dalam pembagunan berkelanjutan melalui pelatihan dan pendapingan di tingkat provinsi dan kabupaten
- Mendukung perlindungan kawasan lindung seperti mangrove, rawa gambut, sagu, kawasan strategis melalui penguatan substansi pola ruang dalam revisi RTRW
- Memperkuat kerjasam pemerintah dengan masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui partisipasi publik dalam penataan ruang

TAF

1. Menegaskan kembali komitmen pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui revisi RTRW dan RPJMD Provinsi
2. Mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, mendukung masyarakat adat untuk mengembangkan penghidupan dan perlindungan lingkungan hidup
3. Menerapkan moratorium izin-izin dan meninjau ulang izin-izin yang telah terbit di sektor pertambangan yang didiskusikan dengan ESDM

4. Mendorong insentif fiskal ekologis kepada pemerintah kabupaten/kota (TAKE, TANE, TIFA dan PES)
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data dan informasi

TAF

1. Menegaskan kembali komitmen pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui revisi RTRW dan RPJMD Provinsi
2. Mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, mendukung masyarakat adat untuk mengembangkan penghidupan dan perlindungan lingkungan hidup
3. Menerapkan moratorium izin-izin dan meninjau ulang izin-izin yang telah terbit di sektor pertambangan yang didiskusikan dengan ESDM

WRI

1. Tata Kelola Lahan Berkelanjutan
    - Mendorong implementasi kebijakan satu peta tingkat provinsi maupun kabupaten
    - Mendukung proses-proses pemetaan wilayah adat dilakukan secara partisipatif dan multipihak
    - Memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi dan analisis perizinan berbasis lahan

2. Pembangunan Rendah Karbon
    - Bersama dengan mitra pembangunan mendukung kebijakan pembangunan rendah karbon
    - Memberikan bantuan teknis dalam mengimplementasikan pembangunan rendah karbon seperti penguatan kapasitas dalam penelitian dan aksi iklim

3. Pengembangan Kapasitas Penelitian
    - Bekerjasama dengan pemerintah daerah, Universitas , CSO untuk pengembangan kapasitas penelitian yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua
    - Mendukung proses berbagi pengetahuan dan keterampilan dari berbagai pihak yang mendorong pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua

INOBU

1. Pengembangan strategi untuk pertumbuhan hijau dan inklusif (update perkembangan REDD-FREL)
2. Pengembangan Rencana Bisnis dengan KPH
3. Skema Produksi berkelanjutan skala kecil

ECONUSA

1. Mendukung Penyusunan Dokumen Rencana PRK Daerah (RPRKD) Provinsi Papua dan Papua Barat
2. Terlibat dalam Diskusi/Memberikan masukan Update NDC
3. Study Rantai Pasok Sawit dan Logging di Papua dan Papua Barat
4. Evaluasi Perizinan: bekerja sama dengan Dinas TPHBun dalam melaksanakan evaluasi perizinan, menyusun rekomendasi, sampai kepada tindak lanjut evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit
5. Pemantauan dari udara bersama Dinas TPHBun Papua Barat
6. Memberikan masukan data spasial sebaran bahasa ke Tim Revisi RTRW
7. Memberikan masukan potensi penambahan wilayah lindung ke RTRW dari hasil Evaluasi Perizinan
8. Penguatan jejaring ekowisata se-Tanah Papua
9. Pendampingan 10 Desa di Landscape Sorong Raya untuk ketahanan pangan selama masa Covid19
10. Pengumpulan informasi kompherensif Teluk Arguni-Kaimana
11. Mangrove Expedition Bersama Balitbangda dan WRI
12. Dukungan implementasi PPRK di Provinsi Papua Barat dan Papua, di tingkat provinsi dan tingkat tapak
13. Dukungan kepada kabupaten pilot PPRK di Provinsi Papua Barat dan Papua
14. Koordinator pembentukan helpdesk PPRK Papua Barat dan Papua
15. Penyusunan dokumen Tinjauan terhadap RUU Cipta Kerja Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Khusus di Tanah Papua

TINDAK LANJUT

1. Kesiapan Provinsi Papua Menjadi Tuan Rumah kegiatan ICBE 2021.

2. Terkait UU Otsus terutama terkait anggaran dana bagi hasil yang setara dengan 2 persen dari nasional sampai 2021. Dan dana bagi hasil Otsus berlaku sampai 2045. Bukan otsusnya yang berakhir.Pemerintah provinsi berinisiatif merancang UU perubahan Otsus plus dan sudah dikoordinasikan dengan Papua Barat. dari Provinsi Papua Barat 2 tahun ini telah menyiapkan sebuah draft usulan ke nasional terkait keberlanjutan UU Otsus yang isinya menyesuaikan dengan UU Otsus sendiri namun belum terjadinya kesepahaman antara nasional dan daerah sehingga belum ada kesepakatan final. Sekarang ini proporsi 67% dana Otsus 11 % nya dari dana tambahan infrastruktur. Jika dana 2% tidak diturunkan maka kita kekurangan 54 %. Papua barat juga sedang menyusun Draft UU ini. Perlu duduk bersama menyusun agar adanya keterlibatan kedua provinsi ini.

3. Kebutuhan dukungan wali data peta adat dari mitra pembangunan dalam merumuskan mekanisme wali data walau sudah diatur melalui perdasus tetapi masih berbenturan dengan peraturan sektoral.

4. Evaluasi perizinan dilanjutkan dan mengusulkan mencabut perizinan yang tidak produktif

5. RUU Cipta Kerja perlu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat adat serta memperhatikan UU Otonomi Khusus.

6. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Tanah Papua.